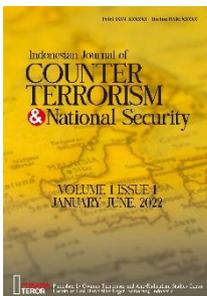


Intelligence in Countering Hoaxes in Indonesia

Daniel Junwaldi MP Nainggolan

North Sumatra Regional Police, Medan, Indonesia



ABSTRACT: This research is motivated by the existence of many potential people who are consumed by hoax information that is available on various social media that are freely circulating in cyberspace. The potential for spreading hoax information in the Salatiga area is very disturbing to the community so that appropriate efforts are needed to overcome these problems. The purpose of this study is to explain the function of gathering intelligence in preventing the spread of hoaxes ahead of the presidential election in the jurisdiction of the Salatiga Police, the mechanism for raising intelligence and explaining the factors that influence it. The knife of analysis in this research is the theory of strategic management, management theory and the concept of raising intelligence. This research was conducted with a qualitative approach with a case study research method, which was then carried out through interviews, observations and document studies and analyzed by reducing data, presenting data and verifying data. The results of this study indicate the function of gathering intelligence in preventing the spread of hoaxes ahead of the presidential election in the jurisdiction of the Salatiga Police. The intelligence-raising mechanism is implemented with planning steps, the implementation of which includes the stages of infiltration, dispersal, denial, direction, investigation of allegiances, shifts, and mergers, as well as evaluating and reporting intelligence-

raising actions to the leadership. The influencing factors come from the action agents/intruders who do not have reliable capabilities evenly in the implementation of intelligence-raising actions, the limited budget for intelligence-raising operations, the lack of infrastructure facilities used for intelligence-raising operations and the lack of appropriate methods in implementing the action-raising activities. intelligence, as well as the sensitivity of the target to the actions of infiltrating agents who carry out these intelligence-raising actions. Suggestions in this study are to provide intruders with various intelligence-raising action training standards and provide intruders with various abilities to approach the public and the ability to utilize technology that can be used for intelligence-raising actions.

KEYWORDS: Hoax, General Election, Intelligence, National Security



Copyright © 2022 by Author(s). This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions.

How to cite:

Nainggolan, Daniel Junwaldi MP. "Intelligence in Countering Hoaxes in Indonesia". *Indonesian Journal of Counter Terrorism and National Security* 1, No. 2 (2022): 119-198.
<https://doi.org/10.15294/ijctns.v1i2.60585>.

I. PENDAHULUAN

Jumlah pengguna internet dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan, seiring dengan jumlah peningkatan penyebaran hoax yang menggiring opini masyarakat hingga terbentuklah persepsi salah terhadap suatu informasi yang sebenarnya. Penyebaran hoax atau informasi yang direkayasa bertujuan untuk menutupi informasi yang sebenarnya, sebagai upaya pemutarbalikan fakta, dengan cara membanjiri suatu media dengan pesan yang salah agar bisa menutupi informasi yang benar. Hoax memberikan dampak yang sangat besar bagi kehidupan sosial masyarakat. Khususnya dijadikan strategi kampanye dalam masa pemilihan Presiden tahun 2019 ini.

Hoax yang berbau suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) sangat banyak disebarakan ke media sosial online. Dampaknya banyak orang terpengaruh oleh berita hoax tersebut, sehingga muncul rasa curiga, benci, sentimen terhadap orang yang memiliki perbedaan Sara tersebut. Media Sosial Online merupakan sarana terbaik bagi mereka yang ingin digunakan untuk menyampaikan berbagai hal negatif oleh seseorang ataupun pihak-pihak tertentu untuk berbagai kepentingannya, sehingga hal ini membuat tempat yang subur bagi munculnya informasi hoax tersebut.

Penanggulangan hoax saat ini telah dilakukan melalui beberapa aksi seperti aksi deklarasi hoax, gerakan anti hoax, pelaksanaan fungsi cyber patrol atau kegiatan lainnya yang diupayakan untuk pencegahan hoax melalui satgas nusantara yang ada di Polres Salatiga. Melalui Satgas Nusantara ini sendiri kita tau ada apa tidak adanya berita masuk tentang adanya berita hoax yang masuk apa tidak. Namun upaya tersebut tentu memiliki banyak kendala dan tidak sepenuhnya tuntas dalam mempengaruhi sikap, emosi, tingkah laku, kebiasaan, opini dan persepsi mereka terhadap berita tersebut, mana kala apabila masyarakat telah terlanjut termakan hoax tersebut.

Upaya yang tepat untuk meluruskan permasalahan yang ada ialah melakukan penggalangan intelijen, yang harapannya dengan aksi penggalangan intelijen ini masyarakat tetap tidak terpengaruh dengan tujuan aksi penggalangan intelijen ini sehingga mereka tetap mampu memandang informasi yang diterimanya secara cerdas dan mengambil sikap yang bijak dalam menindaklanjuti informasi tersebut. Upaya penggalangan intelijen ini dilakukan berdasarkan amanat Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor, dijelaskan

bahwa Satuan Intelijen Keamanan sebagaimana dimaksud Pasal 10 huruf b merupakan unsur pelaksana tugas pokok yang berada di bawah Kapolres yang bertugas menyelenggarakan dan membina fungsi Intelijen bidang keamanan, melakukan deteksi aksi dengan cara melakukan penyelidikan intelijen, melakukan pengamanan intelijen, dan melakukan penggalangan intelijen.

Harapan dari pelaksanaan aksi intelijen ini adalah dapat digunakan untuk mempengaruhi dan atau mengubah sikap, tingkah laku, pendapat, emosi dari seluruh anggota organisasi kemasyarakatan (ormas) yang dilakukan secara tertutup agar tercipta kondisi yang mendukung pelaksanaan tugas pokok Polri dalam rangka pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut maka sangat diperlukan prinsip kehati-hatian dalam pelaksanaan penggalangan intelijen, agar tidak terjadi kebocoran informasi sehingga tujuan dilakukannya operasi penggalangan dapat tercapai secara maksimal.

Permasalahan yang ada di wilayah hukum Polres Salatiga ini adalah banyak potensi masyarakat yang termakan informasi hoax yang ada berbagai media sosial yang bebas beredar di dunia maya. Potensi penyebaran informasi hoax di wilayah Salatiga ini sangat meresahkan masyarakat sehingga diperlukan upaya yang tepat untuk mengatasi permasalahan tersebut. Sesuai dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor, dijelaskan bahwa Satuan Intelijen Keamanan sebagaimana dimaksud Pasal 10 huruf b merupakan unsur pelaksana tugas pokok yang berada di bawah Kapolres yang bertugas menyelenggarakan dan membina fungsi Intelijen bidang keamanan, melakukan deteksi aksi dengan cara melakukan

penyelidikan intelijen, melakukan pengamanan intelijen, dan melakukan penggalangan intelijen, Sat Intelkam Polres Salatiga dapat melakukan aksi penggalangan intelijen agar Sat Intelkam tersebut dapat mempengaruhi sikap, emosi, tingkah laku, kebiasaan, opini dan persepsi mereka agar mereka bijak dalam bermedia sosial. Berdasarkan pentingnya aksi penggalangan intelijen inilah aksi penggalangan intelijen dapat diterapkan sebagai upaya pencegahan hingga penanggulangan penyebaran hoax yang ada di wilayah hukum Polres Salatiga. Tetap di Polres Salatiga ini sendiri tidak adanya laporan masuk ke Polres terkait adanya berita hoax yang muncul, dengan tidak adanya berita hoax yangn masuk maka personil Polres Salatiga tetap mengantisipasi akan adanya berita hoax, dengan cara melakukan pencegahan ke berbagai kelompok ataupun individu yang ada di sekitaran wilayah hukum Salatiga, karena agar tetap terciptanya situasi yang aman pada saat dilaksanakannya pemilu tahun 2019.

Berdasarkan identifikasi permasalahan tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana aksi penggalangan intelijen yang ditujukan sebagai upaya pencegahan penyebaran hoax menjelang masa pemilihan presiden di wilayah hukum Polres Salatiga? Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka dapat dirincikan pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana fungsi penggalangan intelijen dalam pencegahan penyebaran hoax menjelang masa pemilihan presiden di wilayah hukum Polres Salatiga?
2. Bagaimana mekanisme penggalangan intelijen dalam pencegahan penyebaran hoax menjelang masa pemilihan presiden di wilayah hukum Polres Salatiga?

3. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi penggalangan intelijen dalam pencegahan penyebaran hoax menjelang masa pemilihan presiden di wilayah hukum Polres Salatiga?

Tujuan penelitian ini adalah menjawab permasalahan yang ada, yaitu:

1. Menjelaskan fungsi penggalangan intelijen dalam pencegahan penyebaran hoax menjelang masa pemilihan presiden di wilayah hukum Polres Salatiga.
2. Menjelaskan mekanisme penggalangan intelijen dalam pencegahan penyebaran hoax menjelang masa pemilihan presiden di wilayah hukum Polres Salatiga.
3. Menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi penggalangan intelijen dalam pencegahan penyebaran hoax menjelang masa pemilihan presiden di wilayah hukum Polres Salatiga.

II. TINJAUAN KEPUSTAKAAN

1. *Kepustakaan Penelitian*

Kepustakaan penelitian adalah penelitian terdahulu yang dilakukan oleh para ahli atau sarjana dengan topik yang sama yang difungsikan sebagai sumber referensi penelitian yang dianggap memiliki relevansi dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti. Terkait dengan hal tersebut maka kepustakaan penelitian yang akan digunakan oleh peneliti adalah:

- 1) Kurniawan Hari Siswoko. 2017. Kebijakan Pemerintah Menangkal Penyebaran Berita Palsu atau 'Hoax'. Vol. 1, No. 1, April 2017: hlm 13-19

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya penyebaran berita palsu secara masif dan cepat di internet dan media sosial yang mendorong pemerintah untuk mengambil langkah demi menangkal permasalahan tersebut. Awalnya, pemerintah meyakini bahwa penyebaran berita palsu tersebut bisa ditangkal dengan memblokir sejumlah situs internet yang bermasalah. Penelitian ini meyakini bahwa pemblokiran situs internet tidak akan efektif dalam membendung penyebaran berita palsu. Oleh karena itu, pemerintah akan membutuhkan langkah lainnya untuk mengatasi maraknya penyebaran berita palsu di internet.

Penelitian ini dilakukan dengan observasi dan analisis isi pemberitaan di media massa, khususnya Kompas dan The Jakarta Post. Langkah pertama yang dilakukan adalah melakukan analisa terhadap isi berita yaitu suatu teknik penelitian untuk penggambaran kuantitatif, sistematis dan obyektif atas isi komunikasi. Langkah selanjutnya adalah melakukan pembuatan kesimpulan dengan mengidentifikasi karakteristik sebuah pesan secara sistematis, selain itu juga menggunakan metode untuk mempelajari dan menganalisis komunikasi secara sistematis, obyektif dan kuantitatif dengan tujuan mengukur beberapa variabel penelitian. Penelitian ini menemukan fakta bahwa pemerintah mengambil langkah-langkah lain diluar pemblokiran situs. Langkah-langkah itu adalah dengan pembentukan Badan Siber Nasional dan langkah kerjasama dengan Dewan Pers serta *Facebook*.

Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama membahas masalah berita bohong (*hoax*) dan penanganan masalah tersebut. Perbedaannya adalah penelitian ini adalah penelitian ini menekankan pada fungsi Sat Intelkam Polres Salatiga sedangkan

kepuustakaan penelitian ini menekankan pada fungsi Pemerintah. Pembaharuan dalam penelitian ini adalah peneliti melakukan penelitian tentang operasi penggalangan intelijen dalam pencegahan penyebaran hoax menjelang masa pemilihan presiden di wilayah hukum Polres Salatiga.

- 2) Vibriza Juliswara. 2017. Mengembangkan Model Literasi Media yang Berkebhinnekaan dalam Menganalisis Informasi Berita Palsu (Hoax) di Media Sosial. Volume 4 No. 2, Agustus 2017

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya permasalahan ujaran kebencian (*hate speech*) mengiringi kebebasan berpendapat di media sosial. Sejak Pilpres 2014 lalu, istilah '*hater*' pun dikenal luas, yang menandai orang-orang dengan kecenderungan membuat pesan ujaran kebencian pada orang atau kelompok tertentu. Kebhinnekaan sebagai pengikat sosial diuji karena kecenderungan praktik ujaran kebencian yang dipromosikan melalui media sosial. Kondisi itu diperparah oleh penyalahgunaan media sosial seperti penyebaran berita bohong atau informasi palsu (*hoax*) yang dampaknya menimbulkan permusuhan dan tidak sesuai dengan budaya bangsa Indonesia yang mengutamakan toleransi. Dalam rangka merespon berkembangnya ujaran kebencian, kajian ini mencoba untuk mengembangkan suatu model literasi media yang berkebhinnekaan dalam menganalisis informasi palsu (*hoax*) dalam berita di media sosial. Melalui pengembangan model kajian literasi media sebagai pendekatan yang memberdayakan pengguna media sosial (*netizen*) maka diasumsikan para *netizen* akan lebih mampu mengkonstruksi muatan yang positif dalam memanfaatkan media sosial.

Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama membahas masalah berita bohong (*hoax*). Perbedaannya adalah penelitian ini merupakan penelitian pengembangan sedangkan rencana penelitian ini merupakan penelitian empiris mengenai fungsi Sat Intelkam Polri dalam pelaksanaan penggalangan intelijen untuk pencegahan berita bohong (*hoax*). Pembaharuan dalam penelitian ini adalah peneliti melakukan penelitian tentang operasi penggalangan intelijen dalam pencegahan penyebaran hoax menjelang masa pemilihan presiden di wilayah hukum Polres Salatiga.

Berdasarkan beberapa hasil kepustakaan penelitian di atas, diperoleh perbandingan kepustakaan penelitian berikut ini:

Tabel 1. Perbandingan Kepustakaan Penelitian

No	Peneliti	Persamaan	Perbedaan	Pembaharuan
1	Kurniawan Hari Siswoko. 2017. Kebijakan Pemerintah Menangkal Penyebaran Berita Palsu atau 'Hoax'. Vol. 1, No. 1, April 2017: hlm 13-19	<ul style="list-style-type: none"> • Sama-sama membahas masalah berita bohong (<i>hoax</i>) dan penanganan masalah tersebut • Sama-sama membahas model penanggulangan berita bohong (<i>hoax</i>) 	<ul style="list-style-type: none"> • Penelitian ini menekankan pada fungsi Polri sedangkan kepustakaan penelitian ini menekankan pada fungsi Pemerintah. • Penelitian ini merumuskan berbagai model penanganan berita bohong (<i>hoax</i>) sedangkan kepustakaan penelitian ini lebih menekankan pada pembentukan Badan Siber Nasional dan langkah kerjasama dengan Dewan Pers serta <i>Facebook</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • Pembaharuan dalam penelitian ini adalah peneliti melakukan penelitian tentang berbagai model penanggulangan berita bohong (<i>hoax</i>) yang dilakukan oleh Sat Intelkam Polresta Bogor Kota dan melakukan evaluasi mengenai model-model tersebut, serta merumuskan strategi yang tepat dalam penanggulangan berita bohong (<i>hoax</i>) di media sosial
2	Vibriza Juliswara. 2017.	<ul style="list-style-type: none"> • Sama-sama membahas 	<ul style="list-style-type: none"> • Perbedaannya adalah penelitian 	<ul style="list-style-type: none"> • Pembaharuan dalam penelitian

No	Peneliti	Persamaan	Perbedaan	Pembaharuan
	Mengembangkan Model Literasi Media yang Berkebhinnekaan dalam Menganalisis Informasi Berita Palsu (<i>Hoax</i>) di Media Sosial. Volume 4 No. 2, Agustus 2017	<p>masalah berita bohong (hoax) dan penanganan masalah tersebut</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sama-sama membahas model penanggulangan berita bohong (hoax) 	ini merupakan penelitian pengembangan sedangkan rencana penelitian ini merupakan penelitian empiris mengenai fungsi Polri dalam melakukan upaya penanggulangan berita bohong (hoax)	ini adalah peneliti melakukan penelitian tentang berbagai model penanggulangan berita bohong (hoax) yang dilakukan oleh Sat Intelkam Polresta Bogor Kota dan melakukan evaluasi mengenai model-model tersebut, serta merumuskan strategi yang tepat dalam penanggulangan berita bohong (hoax) di media sosial

Sumber: beberapa hasil penelitian yang diolah, 2019

2. *Kepustakaan Konseptual*

A. **Teori Manajemen Strategi**

Menurut Fred R. David (2004: 5), manajemen strategik adalah ilmu mengenai perumusan, pelaksanaan dan evaluasi keputusan-keputusan lintas fungsi yang memungkinkan organisasi mencapai tujuannya. Menurut Husein Umar (1999: 86), Manajemen strategik sebagai suatu seni dan ilmu dalam hal pembuatan (*formulating*), penerapan (*implementing*) dan evaluasi (*evaluating*) keputusan-keputusan startegis antara fungsi yang memungkinkan sebuah organisasi mencapai tujuannya pada masa mendatang. Lawrence R. Jauch dan Wiliam F. Gluech (1998: 33), menjelaskan manajemen strategik adalah sejumlah keputusan dan tindakan yang mengarah pada penyusunan suatu strategi atau sejumlah strategi yang efektif untuk membantu mencapai sasaran perusahaan.

Manajemen strategi ini dilaksanakan melalui langkah-langkah mengenali dan menganalisa lingkungan, memformulasikan strategi, mengimplementasikan strategi dan melakukan evaluasi berikut pengendalian. Berikut ini adalah penjelasannya:

- 1) Manajemen strategi diwujudkan dalam bentuk perencanaan berskala besar mencakup seluruh komponen di lingkungan sebuah organisasi yang dituangkan dalam bentuk rencana strategis (Renstra) yang dijabarkan menjadi perencanaan operasional, yang kemudian dijabarkan pula dalam bentuk program kerja dan proyek tahunan.
- 2) Rencana strategi berorientasi pada jangkauan masa depan.
- 3) Visi, misi, pemilihan strategi yang menghasilkan strategi induk, dan tujuan strategi organisasi untuk jangka panjang merupakan acuan dalam merumuskan rencana strategi, namun dalam teknik penempatannya sebagai keputusan manajemen puncak secara tertulis semua acuan tersebut terdapat di dalamnya.
- 4) Rencana strategi dijabarkan menjadi rencana operasional yang antara lain berisi program-program operasional termasuk proyek-proyek, dengan sasaran jangka sedang masing-masing juga sebagai keputusan manajemen puncak
- 5) Penetapan rencana strategi dan rencana operasi harus melibatkan manajemen puncak karena sifatnya sangat mendasar/prinsipil dalam pelaksanaan seluruh misi organisasi, untuk mewujudkan, mempertahankan dan mengembangkan eksistensi jangka sedang termasuk panjangnya
- 6) Pengimplementasian strategi dalam program-program termasuk proyek-proyek untuk mencapai sarannya masing-masing dilakukan melalui fungsi-fungsi manajemen lainnya yang mencakup pengorganisasian, pelaksanaan, penganggaran dan kontrol. (Fred R. David, 2004: 5),

Konsep manajemen strategi ini digunakan dalam penelitian ini untuk menjelaskan fungsi penggalangan yang dilakukan oleh Satuan Intelijen dalam melakukan pencegahan hoax dan dampaknya bagi masyarakat, terkait dengan fungsi penggalangan intelijen dalam pencegahan penyebaran hoax menjelang masa pemilihan presiden di wilayah hukum Polres Salatiga.

B. Teori Manajemen

Manajemen memainkan peran yang besar dari apa yang dilakukan oleh seorang pimpinan dalam mengelola organisasinya. Dalam melakukan proses manajemen ini, prosedur yang harus dilakukannya meliputi perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan dan pengendalian (Robbin, 2010: 212). Namun untuk mencapai tujuan organisasi sebagaimana yang telah dilakukannya tersebut, terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi proses manajemen tersebut antara lain:

1) Manusia (*Man*)

Manusia mampu melakukan tindakan apapun dalam manajemen seperti melakukan tindakan *planning*, *organizing*, *staffing*, *directing* dan *controlling*. Tanpa manusia seorang manajer tidak akan mungkin mencapai tujuannya.

2) Uang (*Money*)

Uang sebagai sarana manajemen harus digunakan untuk mencapai tujuan manajemen. Kegagalan manajemen sedikit banyak dipengaruhi oleh ketelitian dalam menggunakan uang.

3) Sarana (*Materials*)

Keberadaan alat atau sarana mampu mempermudah usaha / kinerja yang dilakukan oleh manusia, sehingga sarana ini telah berubah kedudukannya sebagai pembantu manusia.

4) Prasarana (*Machines*)

Prasarana memiliki keterkaitan erat dengan sarana, sehingga fungsi prasarana identik dengan fungsi sarana. Oleh karena itu keberadaan prasarana juga mendukung upaya pencapaian tujuan dilakukannya manajemen.

5) Metode (*Method*)

Metode adalah cara yang digunakan untuk mencapai suatu tujuan manajemen. Dengan pemilihan metode yang tepat, maka tindakan kinerja yang dilakukan manusia akan lebih cepat. Oleh karena itu, metode dapat dijadikan alat manajemen yang mampu menunjang pencapaian tujuan organisasi.

6) Sasaran (*Market*)

Sasaran (*market*) adalah tempat di mana organisasi menyebarluaskan (memasarkan) produknya. Memasarkan produk sudah barang tentu sangat penting sebab bila barang yang diproduksi tidak laku, maka proses produksi barang akan berhenti. (GR Terry, 2009: 15-21)

Teori manajemen di atas, tepatnya mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi dalam manajemen digunakan dalam penelitian ini untuk menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi penggalangan Intelijen guna melakukan pencegahan penyebaran hoax menjelang masa pemilihan presiden di wilayah hukum Polres Salatiga.

C. Konsep Penggalangan Intelijen

Penggalangan intelijen adalah semua usaha, pekerjaan dan kegiatan yang dilakukan secara berencana, terarah oleh sarana Intelijen untuk membuat, menciptakan, mengubah suatu kondisi dalam masyarakat sehingga mencapai keadaan yang

menguntungkan terhadap pelaksanaan tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Tujuan penggalangan intelijen, yaitu untuk mempengaruhi dan atau mengubah sikap, tingkah laku, pendapat, emosi dari sasaran tertentu yang dilakukan secara tertutup agar tercipta kondisi yang mendukung pelaksanaan tugas pokok Polri dalam rangka pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat.

Pola kegiatan Penggalangan Intelijen sesuai dengan sifatnya sebagai Operasi Intelijen terdiri dari:

1. Pola Konstruktif Persuasif merupakan kegiatan yang dilakukan untuk dimana sasaran diarahkan untuk berfikir dan menentukan keputusan sendiri sesuai dengan arah yang telah ditentukan oleh pihak penggalang yaitu:
 - a. Membiarkan sasaran berfikir sendiri yaitu sasaran langsung dirangsang dengan fakta dan data yang telah disusun secara terarah agar sasaran dapat berfikir sendiri dan terarah kepada keadaan yang diharapkan pihak penggalang, dan
 - b. Membiarkan sasaran mengambil keputusan sendiri yaitu sasaran dirangsang dengan masalah-masalah yang tersusun dan terarah supaya sasaran mengambil suatu keputusan sendiri untuk berbuat sesuatu yang diharapkan pihak penggalang. Penciptaan masalah-masalah ini adalah dengan cara menyusun dan melemparkan permasalahan yang berkaitan dengan usaha pencapaian tujuan pihak penggalang.
2. Pola Destruktif Persuasif (membiarkan sasaran berbeda pendapat) yaitu sasaran diharapkan mengikuti dorongan lawan dan mengingkari kepatuhan terhadap kelompoknya. Sasaran dirangsang dengan fakta-fakta yang dibuat ada supaya emosi

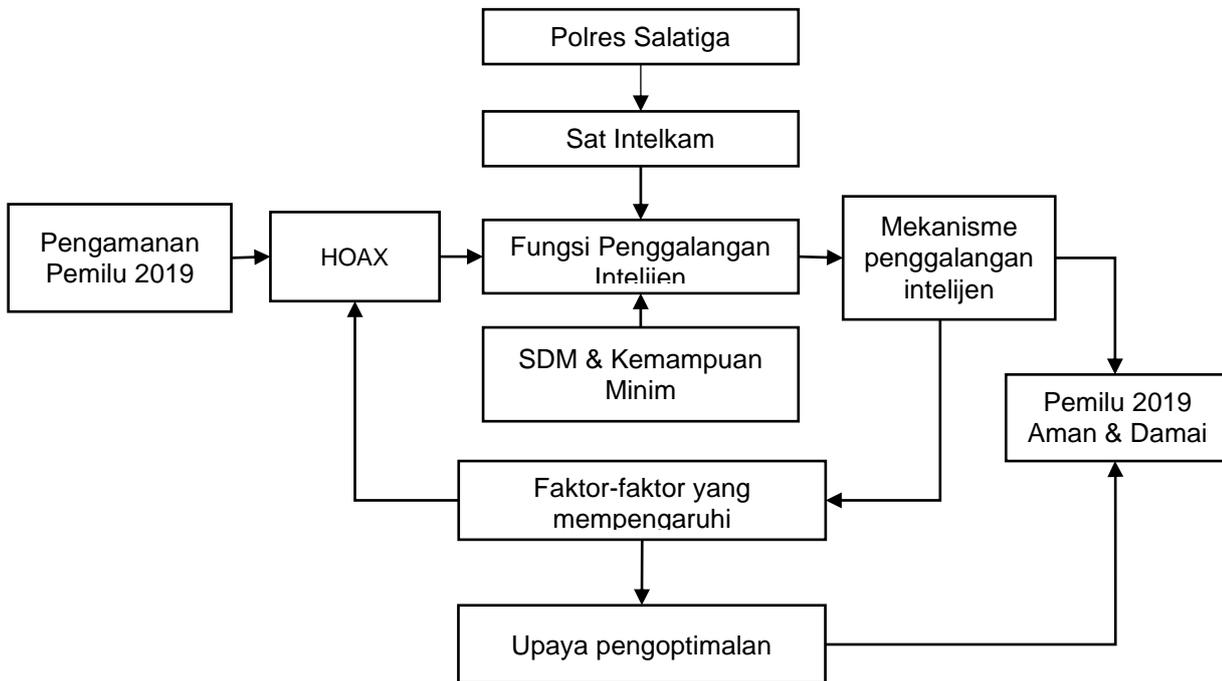
sasaran dieksploitir sehingga terjadi perbedaan pendapat di kalangan sendiri dan kemudian memihak kepada pihak sendiri. (Perkabik No. 3 Tahun 2013 Tentang Penggalangan Intelijen)

Konsep penggalangan intelijen di atas digunakan dalam penelitian ini untuk menjelaskan mekanisme penggalangan intelijen yang ditujukan pencegahan penyebaran hoax menjelang masa pemilihan presiden di wilayah hukum Polres Salatiga.

D. Kerangka Berpikir

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh banyaknya masalah yang harus diselesaikan pada masa Pemilu 2019, yang salah satu adalah penyebaran hoax yang disasarkan kepada salah satu kandidat calon presiden tahun 2019 ini. Untuk mengatasi masalah tersebut, Sat Intelkam memiliki peran penting dalam melakukan aksi penggalangan intelijen guna melakukan pencegahan kasus tersebut, sehingga pelaksanaan Pilpres 2019 berjalan dengan sehat. Berdasarkan adanya kebutuhan tersebut, maka dalam penelitian ini difokuskan mengenai penggalangan intelijen dalam pencegahan penyebaran hoax menjelang masa Pilpres 2019 di wilayah hukum Polres Salatiga.

Dengan menggunakan beberapa teori manajemen strategi, teori manajemen "6M" dan konsep penggalangan intelijen, yang menjadi literatur untuk analisis penelitian ini, dapat dijelaskan keterkaitan antara permasalahan ini dengan berbagai teori dalam penelitian ini yang selengkapnya dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

III. METODE

1. Pendekatan dan Metode Penelitian

Pendekatan yang dipilih peneliti untuk melakukan penelitian mengenai hasil aksi penggalangan intelijen yang ditujukan sebagai upaya pencegahan penyebaran hoax menjelang masa pemilihan presiden di wilayah hukum Polres Salatiga adalah pendekatan kualitatif. Alasan peneliti mengambil penelitian kualitatif adalah agar peneliti dapat melihat lebih dalam mengenai fenomena sosial dan agar peneliti dapat mengaksi penggalangan intelijen yang ditujukan sebagai upaya pencegahan penyebaran hoax menjelang masa pemilihan presiden di wilayah hukum Polres Salatiga. Selain alasan tersebut, Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif ini juga dikarenakan agar peneliti dapat melakukan studi kasus terkait pelaksanaan penggalangan intelijen yang ditujukan sebagai upaya

pengecahan penyebaran hoax menjelang masa pemilihan presiden di wilayah hukum Polres Salatiga dan faktor-faktor yang mempengaruhi aksi penggalangan intelijen yang ditujukan sebagai upaya pencegahan penyebaran hoax menjelang masa pemilihan presiden di wilayah hukum Polres Salatiga sehingga peneliti dapat menjelaskan apa urgensinya (Rully dan Poppy, 2017: 67).

Metode penelitian yang dapat melengkapi atau mendukung pendekatan kualitatif ini adalah metode penelitian lapangan. Berdasarkan fakta di lapangan, sebagaimana temuan aksi penggalangan intelijen yang ditujukan sebagai upaya pencegahan penyebaran hoax menjelang masa pemilihan presiden di wilayah hukum Polres Salatiga dan faktor-faktor yang mempengaruhinya yang dapat dijadikan bahan evaluasi organisasi untuk meningkatkan kualitas Sat Intelkam tersebut agar dapat mencapai semua tujuan perencanaan yang telah ada. Dengan berbagai fenomena tersebut, peneliti berupaya melakukan penelitian lapangan agar peneliti dapat mengeksplorasi secara mendalam masalah-masalah tersebut secara ekstensif.

Penelitian lapangan yang dilakukan oleh peneliti menerapkan suatu teknik observasi yang lebih memprioritaskan observasi dan partisipasi dari beberapa narasumber yang dianggap kompeten untuk menjawab berbagai pertanyaan dari peneliti terkait permasalahan yang ada terkait dengan fungsi penggalangan intelijen yang ditujukan sebagai upaya pencegahan penyebaran hoax menjelang masa pemilihan presiden di wilayah hukum Polres Salatiga, mekanisme penggalangan intelijen yang ditujukan sebagai upaya pencegahan penyebaran hoax menjelang masa pemilihan presiden di wilayah hukum Polres Salatiga, faktor-faktor yang mempengaruhi aksi penggalangan intelijen yang ditujukan sebagai

upaya pencegahan penyebaran hoax menjelang masa pemilihan presiden di wilayah hukum Polres Salatiga.

Untuk tetap menjaga kevalidan dan kereliabelan data temuan penelitian yang dilakukan melalui penelitian lapangan ini, peneliti menjaga subyektifitas penulis, agar obyektifitas data temuan penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan nilai kebenaran yang bisa ditoleransi, sehingga esensi dari hasil penelitian ini tetap terjaga, sehingga kemaslahatan ilmu dapat lebih diutamakan dan penelitian ini memiliki kepraktisan yang lebih luas.

2. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini adalah membahas fungsi penggalangan intelijen yang ditujukan sebagai upaya pencegahan penyebaran hoax menjelang masa pemilihan presiden di wilayah hukum Polres Salatiga, mekanisme penggalangan intelijen yang ditujukan sebagai upaya pencegahan penyebaran hoax menjelang masa pemilihan presiden di wilayah hukum Polres Salatiga, faktor-faktor yang mempengaruhi aksi penggalangan intelijen yang ditujukan sebagai upaya pencegahan penyebaran hoax menjelang masa pemilihan presiden di wilayah hukum Polres Salatiga.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di wilayah hukum Polres Salatiga, khususnya pada fungsi Sat Intelkam Polres Salatiga.

4. Sumber Data

Sumber data penelitian ini dibedakan menjadi dua, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer ini diperoleh peneliti dari hasil pengumpulan data yang dilakukan melalui wawancara dan observasi lapangan terkait masalah fungsi

penggalangan intelijen yang ditujukan sebagai upaya pencegahan penyebaran hoax menjelang masa pemilihan presiden di wilayah hukum Polres Salatiga, mekanisme penggalangan intelijen yang ditujukan sebagai upaya pencegahan penyebaran hoax menjelang masa pemilihan presiden di wilayah hukum Polres Salatiga, faktor-faktor yang mempengaruhi aksi penggalangan intelijen yang ditujukan sebagai upaya pencegahan penyebaran hoax menjelang masa pemilihan presiden di wilayah hukum Polres Salatiga. Dimana narasumber penelitian ini adalah anggota Sat Intelkam Polres Salatiga, Kanit Intelkam Polres Salatiga, Kasat Intelkam Polres Salatiga, dan Kapolres Salatiga.

Sumber data yang mendukung temuan-temuan dari hasil wawancara dan observasi terkait kasus tersebut selanjutnya adalah sumber data sekunder yang diperoleh peneliti dari hasil studi dokumen, dan pengamatan khususnya terkait dengan fungsi penggalangan intelijen yang ditujukan sebagai upaya pencegahan penyebaran hoax menjelang masa pemilihan presiden di wilayah hukum Polres Salatiga, mekanisme penggalangan intelijen yang ditujukan sebagai upaya pencegahan penyebaran hoax menjelang masa pemilihan presiden di wilayah hukum Polres Salatiga, faktor-faktor yang mempengaruhi aksi penggalangan intelijen yang ditujukan sebagai upaya pencegahan penyebaran hoax menjelang masa pemilihan presiden di wilayah hukum Polres Salatiga, baik yang berasal dari peraturan perundang-undangan, hasil dokumentasi dari berbagai media informasi yang ditemukan peneliti terkait aksi penggalangan intelijen yang ditujukan sebagai upaya pencegahan penyebaran hoax menjelang masa pemilihan presiden di wilayah hukum Polres Salatiga.

5. Teknik Pengumpulan Data

Sesuai dengan pendekatan penelitian ini sebagaimana yang dikemukakan oleh Rully dan Poppy (2017: 134), yaitu pendekatan kualitatif, maka teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah:

1) Observasi

Observasi penelitian ini dilakukan dengan upaya mengumpulkan data dan informasi dari sumber primer yang lebih mengoptimalkan pengamatan peneliti. Jenis-jenis data yang diamati peneliti antara lain terkait dengan sikap perilaku nonverbal dari responden yang diteliti, perilaku linguistik yang ditunjukkan oleh responden penelitian, dan pengamatan terhadap perangkat komunikasi yang digunakan oleh responden, serta hubungan responden dengan lingkungan sekitarnya baik yang dilakukan secara langsung maupun secara tidak langsung mengenai aksi penggalangan intelijen yang ditujukan sebagai upaya pencegahan penyebaran hoax menjelang masa pemilihan presiden di wilayah hukum Polres Salatiga.

2) Wawancara

Wawancara yang dilakukan oleh peneliti ini dilakukan secara mendalam terhadap semua yang menjadi target nara sumber penelitian ini, khususnya:

- a. Kapolres Salatiga yang dapat memberikan penjelasan terkait kebijakan yang paling tepat untuk diterapkan dalam pencegahan hoax yang ada pada masa Pilpres 2019.
- b. Kasat Intelkam Polres Salatiga yang memberikan informasi terkait fungsi penggalangan intelijen yang ditujukan

sebagai upaya pencegahan penyebaran hoax menjelang masa pemilihan presiden di wilayah hukum Polres Salatiga, mekanisme penggalangan intelijen yang ditujukan sebagai upaya pencegahan penyebaran hoax menjelang masa pemilihan presiden di wilayah hukum Polres Salatiga, faktor-faktor yang mempengaruhi aksi penggalangan intelijen yang ditujukan sebagai upaya pencegahan penyebaran hoax menjelang masa pemilihan presiden di wilayah hukum Polres Salatiga.

- c. Kanit Intelkam Polres Salatiga yang memberikan informasi terkait mekanisme penggalangan intelijen yang ditujukan sebagai upaya pencegahan penyebaran hoax menjelang masa pemilihan presiden di wilayah hukum Polres Salatiga, faktor-faktor yang mempengaruhi aksi penggalangan intelijen yang ditujukan sebagai upaya pencegahan penyebaran hoax menjelang masa pemilihan presiden di wilayah hukum Polres Salatiga.
- d. Anggota Sat Intelkam Polres Salatiga yang memberikan informasi terkait fungsi penggalangan intelijen yang ditujukan sebagai upaya pencegahan penyebaran hoax menjelang masa pemilihan presiden di wilayah hukum Polres Salatiga, mekanisme penggalangan intelijen yang ditujukan sebagai upaya pencegahan penyebaran hoax menjelang masa pemilihan presiden di wilayah hukum Polres Salatiga, faktor-faktor yang mempengaruhi aksi penggalangan intelijen yang ditujukan sebagai upaya pencegahan penyebaran hoax menjelang masa pemilihan presiden di wilayah hukum Polres Salatiga.

3) Studi Dokumen

Studi dokumen ini merupakan upaya yang dilakukan oleh peneliti untuk mengumpulkan data dari berbagai surat, laporan, atau dokumen apapun baik dokumen tertulis, audiovisual maupun data elektronik lainnya yang terkait pelaksanaan fungsi penggalangan intelijen yang ditujukan sebagai upaya pencegahan penyebaran hoax menjelang masa pemilihan presiden di wilayah hukum Polres Salatiga, mekanisme penggalangan intelijen yang ditujukan sebagai upaya pencegahan penyebaran hoax menjelang masa pemilihan presiden di wilayah hukum Polres Salatiga, faktor-faktor yang mempengaruhi aksi penggalangan intelijen yang ditujukan sebagai upaya pencegahan penyebaran hoax menjelang masa pemilihan presiden di wilayah hukum Polres Salatiga.

6. Validasi Data

Penelitian ini dilakukan dengan memvalidasi ahli yaitu dosen pembimbing yang selalu memantau perkembangan hasil penelitian dan penulisan skripsi ini, sehingga adanya kesalahan informasi dapat diperbaiki sedini mungkin berdasarkan petunjuk dosen pembimbing peneliti.

7. Teknik Analisis Data

Teknik analisis yang dilakukan penulis sesuai dengan penjelasan Rully dan Poppy (2017: 152) antara lain:

- 1) Memvalidasi data yang diperoleh melalui wawancara, pengamatan dan studi dokumen, yang dilakukan dengan cara menguji kredibilitas data tersebut sesuai dengan keterangan ahli (berdasarkan bimbingan dari dosen pembimbing), melakukan

transferabiliti data atau keteralihan data, melihat dependabiliti atau ketergantungan data yang ditujukan untuk menguji stabilitas data, dan mengkonfirmasi hasil penelitian ini dari beberapa hasil penelitian baik yang diperoleh dari wawancara, pengamatan maupun studi dokumen atau menunjukkan kepastian data penelitian yang dapat digunakan untuk menunjukkan netralitas data dan obyektifitas data penelitian mengenai fungsi penggalangan intelijen yang ditujukan sebagai upaya pencegahan penyebaran hoax menjelang masa pemilihan presiden di wilayah hukum Polres Salatiga, mekanisme penggalangan intelijen yang ditujukan sebagai upaya pencegahan penyebaran hoax menjelang masa pemilihan presiden di wilayah hukum Polres Salatiga, faktor-faktor yang mempengaruhi aksi penggalangan intelijen yang ditujukan sebagai upaya pencegahan penyebaran hoax menjelang masa pemilihan presiden di wilayah hukum Polres Salatiga sehingga hasil penelitian ini benar-benar obyektif.

- 2) Mengorganisasikan data dan informasi yang diperoleh ini dilakukan dengan cara mentranskripsikan data penelitian, mereduksi data penelitian, dan melakukan penggabungan data, yang mana dari hasil pengorganisasian data ini permasalahan mengenai fungsi penggalangan intelijen yang ditujukan sebagai upaya pencegahan penyebaran hoax menjelang masa pemilihan presiden di wilayah hukum Polres Salatiga, mekanisme penggalangan intelijen yang ditujukan sebagai upaya pencegahan penyebaran hoax menjelang masa pemilihan presiden di wilayah hukum Polres Salatiga, faktor-faktor yang mempengaruhi aksi penggalangan intelijen yang ditujukan sebagai upaya pencegahan penyebaran hoax menjelang masa pemilihan presiden di wilayah hukum Polres Salatiga yang dapat dijelaskan riil sesuai fakta di lapangan dan dapat dianalisa

dengan tepat oleh peneliti berdasarkan teori-teori yang telah terpilih tersebut.

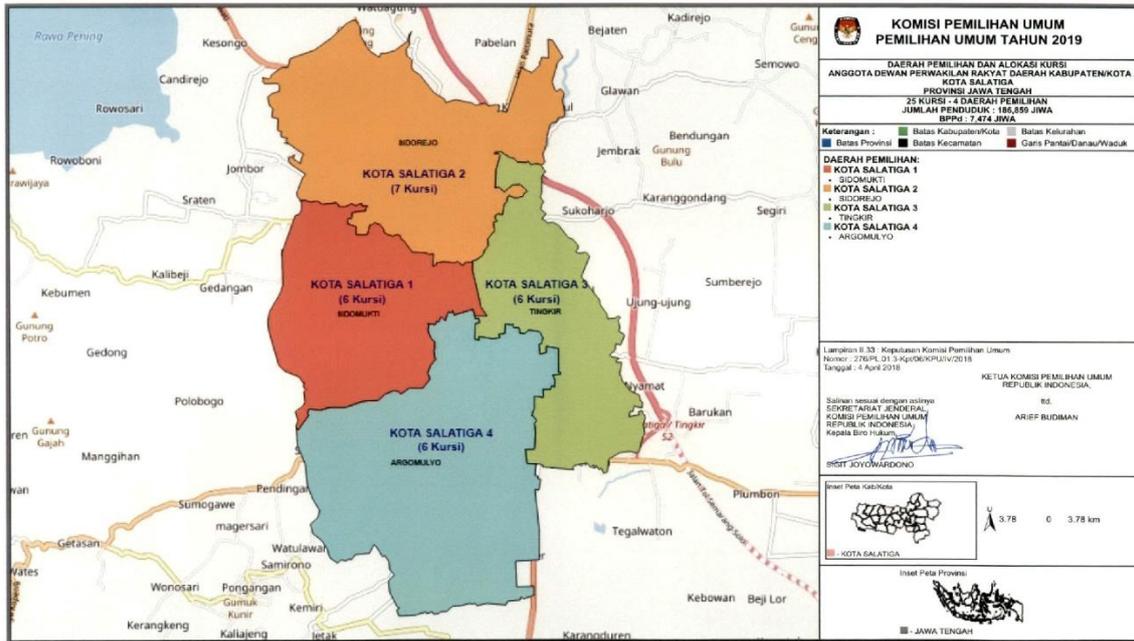
- 3) Menyajikan temuan data penelitian sesuai dengan deskripsi yang ada, tema data yang ditemukan, dan hasil diskusi narasi khususnya mengenai penggalangan intelijen yang ditujukan sebagai upaya pencegahan penyebaran hoax menjelang masa pemilihan presiden di wilayah hukum Polres Salatiga, mekanisme penggalangan intelijen yang ditujukan sebagai upaya pencegahan penyebaran hoax menjelang masa pemilihan presiden di wilayah hukum Polres Salatiga, faktor-faktor yang mempengaruhi aksi penggalangan intelijen yang ditujukan sebagai upaya pencegahan penyebaran hoax menjelang masa pemilihan presiden di wilayah hukum Polres Salatiga dan berbagai hasil analisisnya.
- 4) Memvalidasi temuan data penelitian ini dilakukan dengan cara melakukan triangulasi data yaitu menggunakan beberapa pendekatan dalam melakukan penelitian agar data temuan dan hasil analisisnya benar-benar terfokus mampu menjelaskan fungsi penggalangan intelijen yang ditujukan sebagai upaya pencegahan penyebaran hoax menjelang masa pemilihan presiden di wilayah hukum Polres Salatiga, mekanisme penggalangan intelijen yang ditujukan sebagai upaya pencegahan penyebaran hoax menjelang masa pemilihan presiden di wilayah hukum Polres Salatiga, faktor-faktor yang mempengaruhi aksi penggalangan intelijen yang ditujukan sebagai upaya pencegahan penyebaran hoax menjelang masa pemilihan presiden di wilayah hukum Polres Salatiga.
- 5) Menafsirkan dan menteorisasikan temuan yang dilakukan sebagai upaya subyektifitas penulis untuk mengkomunikasikan hasil penelitian dengan melibatkan 'rasa data' atau memberikan makna informasi atau pelajaran yang tersaji dari penelitian ini

khususnya mengenai fungsi penggalangan intelijen yang ditujukan sebagai upaya pencegahan penyebaran hoax menjelang masa pemilihan presiden di wilayah hukum Polres Salatiga, aksi penggalangan intelijen yang ditujukan sebagai upaya pencegahan penyebaran hoax menjelang masa pemilihan presiden di wilayah hukum Polres Salatiga, faktor-faktor yang mempengaruhi aksi penggalangan intelijen yang ditujukan sebagai upaya pencegahan penyebaran hoax menjelang masa pemilihan presiden di wilayah hukum Polres Salatiga.

IV. HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di wilayah hukum Polres Salatiga. Wilayah hukum Polres Salatiga terletak di tengah-tengah wilayah Kabupaten Semarang. Terletak antara $007^{\circ} 17'$ dan $007^{\circ} 17' 23''$ Lintang Selatan dan antara $110^{\circ} 27' 56,81''$ dan $110^{\circ} 32' 4,64''$ Bujur Timur. Secara administratif Kota Salatiga terbagi menjadi 4 kecamatan dan 23 kelurahan. Luas wilayah Kota Salatiga pada tahun 2015 tercatat sebesar 56.781 km^2 , Luas yang ada terdiri dari 7.805 km^2 (13,75 persen) lahan sawah dan 48.976 km^2 (86,25 persen) bukan lahan sawah. Untuk mengamati wilayah hukum Polres Salatiga ini dapat dilihat pada gambar berikut ini:



Gambar 2. Peta Wilayah Hukum Polres Salatiga

Sumber: KPU Kabupaten Salatiga, 2019

Penelitian ini difokuskan pada upaya pencegahan *hoax* yang ada di wilayah hukum Polres Salatiga ini dikarenakan adanya prediksi dari hasil telaah mingguan yang dilakukan oleh Sat Intelkam Polres Salatiga, diperoleh informasi bahwa dalam pelaksanaan Pemilu 2019 nantinya akan terjadi berbagai potensi pelanggaran Pemilu yang berasal dari aksi-aksi *money politik*, sabotase / teror, penyebaran berita *hoax* dan *hate speech* yang sekarang marak terjadi di berbagai media sosial di wilayah Kota Salatiga, untuk itu perlu dilakukan upaya pencegahan *hoax*, karena saat ini sudah mulai masuk tahapan kampanye Pemilu tahun 2019, dan ancaman *hoax* tersebut yang dapat memutarbalikkan fakta sehingga dapat membunuh karakter seseorang dan menjatuhkan salah satu pihak kandidat tersebut dalam pelaksanaan Pemilu 2019 nantinya. Namun ancaman *hoax* bukan hanya itu saja, masyarakat awam dapat dengan mudah tertipu dan akhirnya ia akan menentukan pilihan yang salah atas adanya pengaruh dari informasi *hoax* tersebut, yang selanjutnya hal ini

mampu membuat timbulnya keresahan di lingkungan masyarakat luas.

Namun jika menelisik mengenai proses pengebaran hoax di media tersebut yang cepat merambah ke publik dalam satu kali klik di media penyebaran hoax tersebut, maka imbas yang diperoleh dari perilaku mekanis hoax sebagai konsekuensi atas masifnya teknologi dan media sosial akibat dari adanya kemudahan menerima, berbagi, dan memberi komentar melalui media sosial seperti *facebook*, *twitter*, *whatsapps*, dan sebagainya, yang memperlihatkan bahwa informasi saling bertumpuk, berimplosif, dan bereksplosif karena direproduksi melalui opsi *share* dan *salin/copy* yang tersedia dalam sistem media sosial, bahkan setiap orang bisa mengomentari info yang diterima itu sesuka hati tanpa konfirmasi hal ini akan mampu membuat suatu fenomena *hyperreality*.

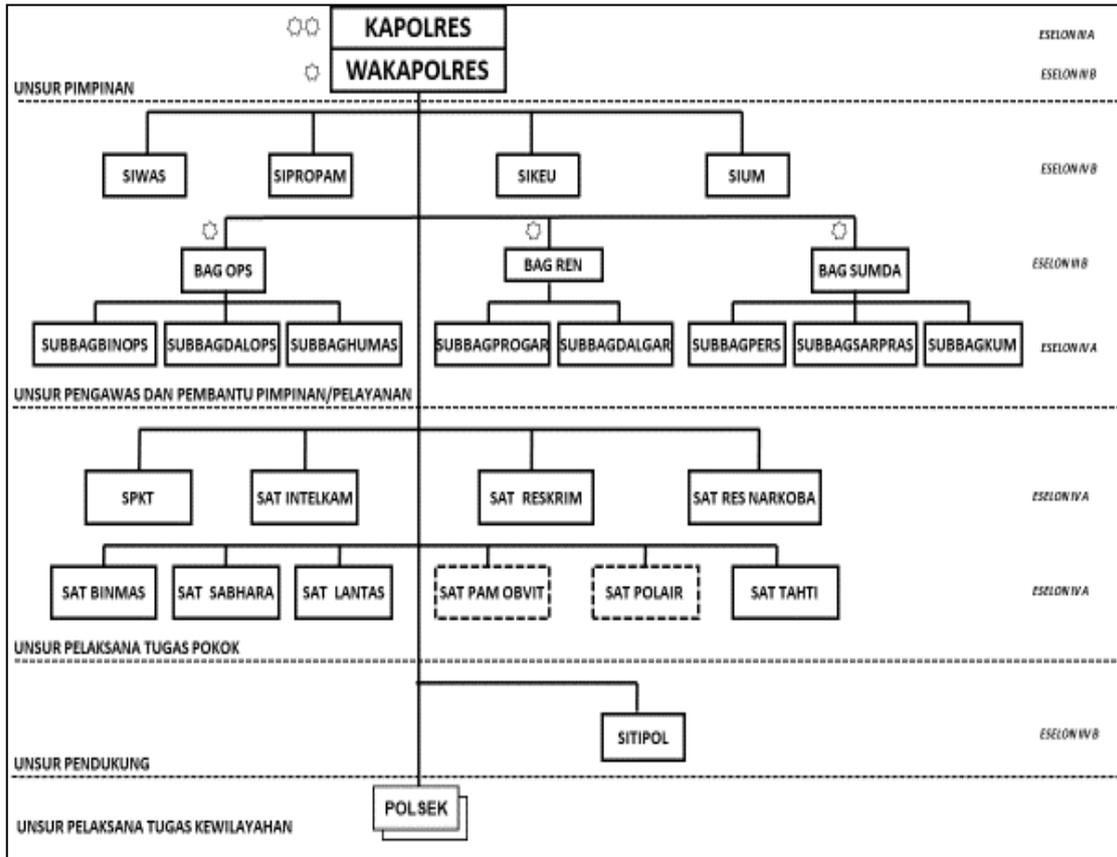
Berdasarkan adanya penjelasan tersebut maka dapat diketahui bahwa sangat sulit untuk membedakan berita yang riil dan bukan, atau sulit melakukan klarifikasi karena informasi saling bertumpuk satu sama lain dan sulit melacak dari mana informasi itu berawal, karena otentisitas informasi menjadi tidak jelas, akibat adanya pemakaian bahasa komunikasi yang berbeda, dan realitas teknologi yang marak selama ini, sehingga hal ini akan dapat membuat suatu komoditas *hoax* tersebut dapat merepresentasikan bahwa masyarakat virtual era ini abai dengan kedalaman esensi informasi (*depthlessness*) dan ahistoris.

Dampaknya, penyebaran informasi bohong yang selanjutnya disebut *hoax* ternyata lebih dahsyat bila dibandingkan dengan bom yang diledakkan di suatu kawasan. Jika bom tersebut di ledakkan disuatu tempat, maka yang akan punah adalah satu generasi beserta

lingkungan saat itu, namun kedahsyatan efek *hoax* mampu merusak bukan hanya satu generasi tetapi mampu merusak banyak generasi bahkan berabad-abad lamanya. Melihat banyaknya dampak negatif dari penyebaran informasi hoax tersebut yang dapat menyasar masyarakat luas, maka diperlukan upaya pencegahan penyebaran hoax tersebut yang tepat agar berbagai generasi manusia tersebut tidak termakan hoax.

2. *Deskripsi Polres Salatiga*

Polres Salatiga merupakan salah satu Satuan Kewilayahan Polri Polda Jawa Tengah yang berkedudukan di tengah-tengah kabupaten semarang. Dengan didasari Peraturan Kapolri Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja, Polres Subang melaksanakan tugas pokoknya sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat, memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, serta menegakkan hukum. Adapun struktur organisasi Polres Subang sebagai berikut:



Gambar 3. Susunan Organisasi Polres Salatiga

Dilihat dari struktur diatas seperti yang dijelaskan pada pasal 7 sampai pasal 13 Peraturan Kapolri No.23 Tahun 2010 struktur organisasi yang berlaku di polres Subang terdiri dari: unsur pimpinan, unsur pengawasan dan pembantu pimpinan / pelayanan, unsur pelaksanaan tugas pokok, unsur pendukung, dan unsur pelaksana tugas kewilayahan

V. FUNGSI PENGGALANGAN INTELIJEN DALAM PENCEGAHAN PENYEBARAN HOAX MENJELANG MASA PEMILIHAN PRESIDEN DI WILAYAH HUKUM POLRES SALATIGA

Salah satu pelaksanaan tugas Polri dalam Pilpres 2019 adalah memastikan terselenggaranya Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Oleh karena itu, yang perlu dilakukan sebagai upaya untuk penciptaan kondisi dan situasi yang menguntungkan agar tercapai kondisi dan situasi yang menguntungkan agar tercapai tujuan pokok Polri adalah melakukan penggalangan intelijen. Penggalangan intelijen ini adalah semua usaha, pekerjaan dan kegiatan yang harus dilakukan secara berencana, terarah oleh sarana Intelijen untuk membuat, menciptakan, mengubah suatu kondisi dalam masyarakat sehingga mencapai keadaan yang menguntungkan terhadap pelaksanaan tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sedangkan kegiatan Penggalangan Intelijen adalah semua usaha, pekerjaan, kegiatan dan tindakan yang dilakukan secara berencana dan terarah terhadap sasaran-sasaran individu sebagai *informal leader* maupun terhadap kelompok masyarakat baik kelompok formal maupun kelompok informal yang berpotensi terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat guna mendukung terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat.

Berdasarkan hasil studi dokumen dalam Pasal 3 Peraturan Badan Intelijen Keamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Penggalangan Intelijen Kepolisian Negara Republik Indonesia dijelaskan bahwa kegunaan dari pelaksanaan penggalangan Intelijen Kepolisian adalah tercegah dan terungkapnya usaha-usaha, pekerjaan dan kegiatan pihak lain yang berniat melakukan suatu perbuatan yang dapat menimbulkan,

gangguan, ancaman terhadap stabilitas keamanan ketertiban masyarakat. Hal ini sesuai dengan penjelasan Kasat Intelkam Polres Salatiga seperti berikut:

Fungsi penggalangan intelijen dalam pencegahan penyebaran hoax menjelang masa pemilihan presiden di wilayah hukum Polres Salatiga adalah untuk mencegah dan mengungkap usaha-usaha penyebaran hoax, pekerjaan dan kegiatan pihak lain yang berniat melakukan penyebaran hoax yang dapat menimbulkan, gangguan, ancaman terhadap stabilitas keamanan ketertiban masyarakat, khususnya dalam Penyelenggaraan Pilpres 2019 mendatang. (Hasil wawancara dengan Kasat Intelkam Polres Salatiga Mohammad Bisri SE, 20 Februari 2019).

Berdasarkan hasil studi dokumen selanjutnya, dalam Pasal 5 juga dijelaskan bahwa tujuan penggalangan intelijen, adalah untuk mempengaruhi dan atau mengubah sikap, tingkah laku, pendapat, emosi dari sasaran tertentu yang dilakukan secara tertutup agar tercipta kondisi yang mendukung pelaksanaan tugas pokok Polri dalam rangka pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, yang disasarkan kepada individu selaku tokoh informal yakni orang perorangan yang mempunyai pengaruh dan peranan tertentu dalam suatu kelompok masyarakat tertentu di daerah tertentu yang dalam kegiatannya berpengaruh terhadap stabilitas kamtibmas dan individu selaku tokoh formal yaitu perorangan yang dilihat dari segi kedudukan fungsi dan peranannya mempunyai potensi dan pengaruh yang dominan dalam kehidupan di bidang politik, ekonomi, sosial budaya dan keamanan negara baik formal maupun informal.

Sasaran yang kedua dari aksi penggalangan intelijen ini adalah masyarakat yang kooperatif dalam rangka mewujudkan dan mendukung terciptanya stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif, masyarakat yang nonkooperatif dan diragukan dalam mendukung terciptanya stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif serta masyarakat tertentu yaitu golongan atau kelompok tertentu yang dilihat dari kegiatan, status, profesi maupun pengaruhnya dapat diidentifikasi sebagai golongan atau kelompok tertentu dalam bidang politik, ekonomi, sosial budaya dan keamanan negara, yang memiliki potensi terhadap terciptanya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat dipilih atas dasar pertimbangan-pertimbangan mudah atau tidaknya dipengaruhi, mudah atau tidaknya penyebaran dalam kelompok/golongan, kedudukan sosial ekonomi dan politiknya dan adanya kedudukan dalam struktur kekuatan/kekuasaan (*Leading personality dan key position*)

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh Kasat Intelkam Polres Salatiga, diketahui bahwa dalam melakukan penggalangan intelijen agar dapat mencapai tujuan-tujuan di atas, ia menjelaskan ada beberapa prinsip yang harus dipenuhi, antara lain disampaikan dalam hasil wawancara berikut ini:

Dalam upaya pencapaian tujuan dari pelaksanaan penggalangan intelijen yang ditujukan untuk pencegahan hoax dalam masa Pilpres 2019 di wilayah hukum Polres Salatiga ini, kami menerapkan 6 prinsip dalam penggalangan intelijen, antara lain:

- a. Kerahasiaan/*clandestine*, yaitu penggalangan dilakukan secara tertutup dan hanya diketahui oleh orang tertentu atau yang bersangkutan saja;

- b. Ketelitian, yaitu penggalangan dilakukan secara cermat dan saksama;
- c. Kedisiplinan, yaitu penggalangan dilakukan dengan dilandasi oleh kesadaran terhadap semua peraturan dan tata tertib yang telah ditetapkan;
- d. Keamanan, yaitu penggalangan dilakukan secara berhati-hati;
- e. Keberanian, yaitu penggalangan dilakukan dengan hati yang mantap dan rasa percaya diri dalam menghadapi kesulitan; dan
- f. Mengutamakan sumber informasi di sasaran utama (primer) secara langsung dan hindari sumber informasi kedua (sekunder) (Hasil wawancara dengan Kasat Intelkam Polres Salatiga Mohammad Bisri SE, 20 Februari 2019).

Berdasarkan hasil penelitian di atas, dapat diketahui bahwa fungsi penggalangan di atas sebagaimana penjelasan dalam teori manajemen strategik, fungsi penggalangan intelijen ini dapat dijadikan sebuah rencana strategi yang berorientasi pada jangkauan masa depan untuk mencegah dampak hoax. Tujuan ini sesuai dengan penjelasan teori manajemen strategik yang dikemukakan oleh Husein Umar (1999: 86), yang menganggap bahwa manajemen strategik adalah sebagai suatu seni dan ilmu dalam hal pembuatan (*formulating*), penerapan (*implementing*) dan evaluasi (*evaluating*) keputusan-keputusan startegis antara fungsi yang memungkinkan sebuah organisasi mencapai tujuannya pada masa mendatang, dimana langkah penggalangan intelijen ini merupakan produk dari hasil evaluasi yang dilakukan berdasarkan adanya dampak penyebaran hoax yang kedahsyatannya mampu merusak bukan hanya satu generasi tetapi mampu merusak banyak generasi bahkan berabad-abad lamanya.

VI. MEKANISME PENGGALANGAN INTELIJEN DALAM PENCEGAHAN PENYEBARAN HOAX MENJELANG MASA PEMILIHAN PRESIDEN DI WILAYAH HUKUM POLRES SALATIGA

Berdasarkan adanya penjelasan di atas, mengenai fungsi penggalangan intelijen yang dapat ditujukan untuk pencegahan hoax beserta dampak negatif yang ditimbulkannya tersebut, sesuai teori manajemen strategi yang dijelaskan oleh Wiliam F. Gluech (1998: 33), diketahui bahwa manajemen strategik adalah sejumlah keputusan dan tindakan yang mengarah pada penyusunan suatu strategi atau sejumlah strategi yang efektif untuk membantu mencapai sasaran perusahaan. Salah satu keputusan atas adanya potensi masalah yang ada di wilayah hukum Polres Salatiga ini yang berasal dari dampak penyebaran hoax tersebut, langkah tindakan keputusan yang diambil untuk mencegah penyebaran hoax tersebut adalah melakukan aksi penggalangan intelijen.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa mekanisme penggalangan intelijen yang ditujukan untuk pencegahan penyebaran hoax menjelang masa Pilpres 2019 di wilayah hukum Polres Salatiga jika dianalisa dengan teori manajemen strategi sesuai yang disampaikan oleh Husein Umar (1999: 86), Manajemen strategik sebagai suatu seni dan ilmu dalam hal pembuatan (*formulating*), penerapan (*implementing*) dan evaluasi (*evaluating*) keputusan-keputusan startegis antara fungsi yang memungkinkan sebuah organisasi mencapai tujuannya pada masa mendatang, langkah-langkah manajemen strategi yang diterapkan melalui penggalangan intelijen tersebut dapat dianalisis sebagai berikut:

1. Perencanaan Penggalangan Intelijen

Perencanaan dalam penggalangan intelijen ditujukan untuk menentukan tahapan-tahapan dalam penggalangan intelijen, agar sasaran yang akan digalang tersebut tepat. Berdasarkan hasil pengamatan, sasaran dalam penggalangan intelijen yang dilakukan dalam pencegahan penyebaran hoax menjelang masa Pilpres 2019 di wilayah hukum Polres Salatiga berupa suatu individu dan kelompok masyarakat. Hal ini sesuai dengan penjelasan yang disampaikan oleh Kasat Intelkam sebagai berikut:

Sebelum tim kami melakukan penggalangan, kami lebih dulu membuat perencanaan agar aksi penggalangan yang kami lakukan berhasil. Melihat tujuan penggalangan ini adalah untuk pencegahan penyebaran hoax menjelang masa Pilpres 2019 di wilayah hukum Polres Salatiga, maka sasaran kami adalah individu dan kelompok masyarakat yang ada di wilayah hukum Salatiga. (Hasil wawancara dengan Kasat Intelkam Polres Salatiga Mohammad Bisri SE, 20 Februari 2019).

Penjelasan tersebut juga sesuai dengan pernyataan Kanit Intelkam III berikut ini:

Perencanaan yang ada dalam penggalangan adalah penentuan rencana sasaran yang akan digalang, kemudian menentukan pelaksanaan penggalangan. Dimana dalam perencanaan ini sangat memberikan pengaruh dalam penentuan rencana pelaksanaan penggalangan tersebut, yang mana dari perencanaan ini selanjutnya juga akan berpegaruh pada rencana hasil dari aksi penggalangan tersebut yang akan dituju. (Hasil wawancara dengan Kanit Intelkam III, Aiptu Agus Saryanto, 21 Februari 2019)

Kasat Intelkam juga menambahkan penjelasan mengenai rencana aksi penggalangan intelijen tersebut, yang selengkapnya disajikan pada hasil wawancara berikut ini:

Melihat dalam aksi penggalangan intelijen yang rencana sasarannya adalah individu dan kelompok masyarakat, maka rencana pelaksanaan aksi penggalangan ini antara lain membuat perencanaan mengenai tahapan penyusupan, penceraiberaian, pengingkaran, pengarahan, pengusut kesetiaan, penggeseran, dan penggabungan. (Hasil wawancara dengan Kasat Intelkam Polres Salatiga Mohammad Bisri SE, 20 Februari 2019)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa dalam perencanaan ini dilakukan untuk menentukan sasaran yang selanjutnya dapat digunakan untuk merencanakan pelaksanaan penggalangan, dimana dari sasaran ini nantinya akan diketahui tahapan apa yang harus dilakukan dalam aksi penggalangan sesuai dengan tujuan yang akan dicapai.

2. Pelaksanaan Penggalangan Intelijen

Langkah kedua setelah membuat rencana penggalangan intelijen adalah melaksanakan penggalangan intelijen. Melihat rencana sasaran dalam aksi penggalangan intelijen ini adalah individu dan kelompok masyarakat maka pelaksanaan penggalangan intelijen ini dilakukan melalui langkah atau tahapan sebagai berikut: penyusupan, penceraiberaian, pengingkaran, pengarahan, pengusut kesetiaan, penggeseran, dan penggabungan. Penjelasan tersebut juga sesuai dengan kutipan wawancara berikut ini:

Pelaksanaan penggalangan intelijen yang disasarkan pada individu dan kelompok masyarakat ini dilakukan melalui tahapan-tahapan penyusupan, penceraiberaian, pengingkaran, pengarahannya, pengusut kesetiaan, penggeseran, dan penggabungan. (Hasil wawancara dengan Kasat Intelkam Polres Salatiga Mohammad Bisri SE, 20 Februari 2019)

Berdasarkan hasil penelitian studi dokumen di lapangan dapat diketahui bahwa pelaksanaan penggalangan intelijen merupakan semua usaha, pekerjaan dan kegiatan yang dilakukan secara terencana, terarah oleh sarana intelijen untuk membuat, menciptakan, mengubah suatu kondisi dalam masyarakat sehingga mencapai keadaan yang menguntungkan terhadap pelaksanaan tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia. Berdasarkan pemahaman tersebut maka dapat diketahui bahwa dalam pencegahan penyebaran hoax menjelang masa Pilpres 2019 di wilayah hukum Polres Salatiga telah dilakukan langkah-langkah khusus dalam aksi penggalangan intelijen. Sesuai dengan hasil studi dokumen terhadap Peraturan Kepala Badan Intelijen Keamanan Polri Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penggalangan Intelijen Kepolisian Negara Republik Indonesia, diketahui bahwa tahapan-tahapan pelaksanaan operasi penggalangan intelijen adalah sebagai berikut:

Penggalangan kelompok masyarakat tertentu dan atau masyarakat luas sebagaimana dimaksud pasal 15 huruf b, dilakukan secara tertutup melalui tahap-tahap:

- a. penyusupan
- b. penceraiberaian
- c. pengingkaran
- d. pengarahannya
- e. pengusut kesetiaan
- f. penggeseran, dan

- g. penggabungan (Hasil Studi Dokumen dalam Pasal 17 Peraturan Kepala Badan Intelijen Keamanan Polri Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penggalangan Intelijen Kepolisian Negara Republik Indonesia)

Untuk mengetahui penjelasan dari masing-masing tahapan dalam pelaksanaan penggalangan intelijen dapat dijelaskan sebagai berikut:

3. Tahap Penyusupan

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada Kanit II Aiptu Toto Juhata, dijelaskan bahwa langkah penyusupan dalam kegiatan penggalangan intelijen dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada kegiatan penyusupan, biasanya yang kami lakukan pertama kali adalah dengan cara menyiapkan agen-agen yang terpercaya, dimana kegiatan ini kami mulai dengan menetapkan sasaran terlebih dahulu yang akan digarap, disusupi dengan agen-agen penggalangan intelijen tersebut yang telah terpilih secara diam-diam dan rahasia melalui sebuah operasi *clandestine*, sehingga sasaran tidak sadar bahwa ia telah tersusupi lawan. (Hasil wawancara dengan Kanit Intelkam II, Aiptu Toto Juhata, 21 Februari 2019)

Kanit Intelkam I, Aiptu Agung Bayu SN., selanjutnya juga menjelaskan bahwa kegiatan penyusupan dikatakan berhasil apabila telah tercapai indikator tertentu. Berikut ini kutipan dari hasil wawancara tersebut:

Kegiatan penyusupan ini dapat dikatakan maksimal apabila telah tercapai indikasi keberhasilan yang telah kami tetapkan sebelumnya terlaksana dengan baik, yaitu indikasi dari kerapihan *cover of action and cover of mission* para penyusup itu

sediri. Apabila penyusup sudah bisa diterima secara wajar di lingkungan sasaran, entah itu dianggap sebagai teman, sebagai sesama aktivis dalam suatu organisasi atau lain organisasi, sebagai rekan, rekan sekerja, sebagai anggota keluarga dan sebagainya (Hasil wawancara dengan Kanit Intelkam I, Aiptu Agung Bayu SN., 21 Februari 2019).

Melengkapi penjelasan sebelumnya, Kanit Intelkam II, Aiptu Toto Juhata juga menegaskan bahwa penyusupan dilakukan dengan penetrasi terhadap sasaran dengan cara memperluas susunan jaringan *clandestine*. Berikut ini penjelasan selengkapnya:

Langkah selanjutnya yang kami lakukan dalam penyusupan ini adalah melakukan penetrasi terhadap sasaran, yang dilakukan dengan cara memperluas susunan jaringan *clandestine*, agar jaringan lain masih tetap ada jika seandainya salah satu jaringan terbongkar. Atau jika agen penetrasi terpaksa harus pergi, maka ia telah meninggalkan jaringan ilegal tersebut sebagai penerus. Untuk menjaga keamanan biasanya kami memakai sistem jaring *compartementasi*. Dengan sasaran kami antara lain Pemerintahan, Organisasi Politik, Organisasi Sosial, Organisasi Massa, Organisasi Pemuda, Mahasiswa, dan Organisasi Agama agar kasus unjuk rasa yang dilakukan oleh organisasi kemasyarakatan (Ormas) ini dapat kami belokkan. (Hasil wawancara dengan Kanit Intelkam II, Aiptu Toto Juhata, 21 Februari 2019)

Kanit Intelkam I, Aiptu Agung Bayu SN. juga menjelaskan bahwa dalam kegiatan penyusupan, biasanya kegiatan penetrasi dilakukan dengan cara menggunakan saluran resmi dan berdomisili di wilayah sasaran. Berikut ini adalah hasil wawancara tersebut

Selain menetapkan sasaran tersebut, biasanya kami juga melakukan penetrasi secara terselubung dengan menggunakan saluran-saluran yang resmi, diantaranya kami berperan sebagai utusan pemerintah atau sebagai utusan organisasi. Dan agar lebih memaksimalkan dalam kegiatan penyusupan yang kami lakukan, biasanya kami sengaja berdomisili di daerah sasaran agar kami dapat membaur di dalam lingkungan masyarakat tersebut. Tindakan ini kami lakukan agar kami bisa masuk ke pihak sasaran tanpa dicurigai sedikitpun. (Hasil wawancara dengan Kanit Intelkam I, Aiptu Agung Bayu SN., 21 Februari 2019)

Berdasarkan hasil pengamatan penelitian, dapat diketahui bahwa agen-agen yang dikirim dalam kegiatan penyusupan bukanlah sembarang agen, tetapi agen yang dibekali dengan keahlian khusus mengenai seluk beluk sasaran dan cara menghadapinya. Selain itu, kecerdasan dari para agen ini juga tidak boleh terlalu ditonjolkan. Agen penyusup ini juga tidak boleh melakukan hal-hal yang dapat memancing kesangsian dan kecurigaan, bahkan sangat diharapkan jika para agen ini mempunyai pengaruh yang cukup di lingkungan sasaran masing-masing.

Berdasarkan hasil wawancara selanjutnya yang dilakukan kepada Kasat Intelkam juga diketahui bahwa agen penyusup yang diterjunkan ke sasaran memiliki kemampuan dan kriteria yang telah sesuai dengan ketentuan Intelijen, yang mana hal ini sesuai dengan kutipan wawancara berikut ini:

Kami mengirim agen penyusup dari anggota yang memiliki kemampuan sesuai dengan kriteria yang telah kami tetapkan, yang akan disusupkan ke daerah sasaran lingkungan organisasi kemasyarakatan (Ormas) yang berencana

melakukan aksi unjuk rasa. Oleh karena itu dalam mengamankan wilayah ini biasanya kami mengambil inisiatif untuk melakukan aktivitas khusus yang mengacu pada aspek-aspek, pola operasi dan mekanisme kegiatan intelijen yang tepat. (Hasil wawancara dengan Kasat Intelkam Polres Salatiga Mohammad Bisri SE, 20 Februari 2019)

Berdasarkan hasil wawancara selanjutnya juga diketahui bahwa dalam mekanisme penggalangan intelijen pada tahap penyusupan juga dilakukan perencanaan hingga pengorganisasian, yang mana hal ini juga sesuai dengan penjelasan Kasat Intelkam berikut ini:

Dalam tahap penyusupan kami juga membuat perencanaan hingga pengawasan organisasi, kegiatan ini kami lakukan untuk menetralsir atau paling tidak dapat memperkecil kemungkinan adanya oposisi-oposisi luar yang hendak memecah belah persatuan tim kita baik anggota maupun pengelolanya. (Hasil wawancara dengan Kasat Intelkam Polres Salatiga Mohammad Bisri SE, 20 Februari 2019).

Berdasarkan hasil wawancara selanjutnya juga diketahui bahwa dalam kegiatan pengorganisasian di tahap penyusupan ini dipilih seorang ketua dan anggota yang khusus. Berikut ini penjelasannya:

Kegiatan pada tahap penyusupan biasanya juga mendapat beberapa permasalahan, sehingga untuk mengatasi potensi permasalahan tersebut, kami biasanya hanya menggunakan orang-orang pilihan. Di mana dalam kegiatan penggalangan intelijen untuk pencegahan penyebaran hoax menjelang masa Pilpres 2019 di wilayah hukum Polres Salatiga cukup ditangani oleh ketua/pemimpin yaitu saya selaku Kasat Intelkam Polres Salatiga. Hal ini kami buat demikian mengingat sensitifnya

masalah validasi hasil penyelidikan sesama anggota yang melakukan aksi penggalangan intelijen tersebut. Jika tim kita sampai salah menangani masalah, bisa jadi hanya akan melahirkan kecurigaan satu sama lain atau bahkan perpecahan di dalam tim kita. Maka dari itu, orang pilihan yang kami terjunkan dalam aksi penyusupan tersebut adalah orang yang mempunyai karakter sesuai kebutuhan dunia intelijen. (Hasil wawancara dengan Kasat Intelkam Polres Salatiga Mohammad Bisri SE, 20 Februari 2019)

Berdasarkan hasil wawancara selanjutnya juga diketahui bahwa dalam pengorganisasian di tahap penyusupan ini, semua anggota atau agen penyusup tersebut memiliki peran yang berbeda-beda, hal ini sesuai dengan penjelasan Kasat Intelkam, Mohammad Bisri SE sebagai berikut:

Dalam dunia intelijen, kami menerapkan sikap disiplin yang sangat tinggi terhadap peran dari masing-masing anggota atau agen yang kami terjunkan. Di mana hal ini menjadi tuntutan yang utama, karena sifat tugasnya yang pada tahap *clandestine* ini setiap pembicaraan agen akan menjadi sangat berbahaya. Hal ini terjadi karena boleh jadi yang seharusnya dirahasiakan akan dibocorkannya pula, karena di setiap organisasi apapun selalu ada klik-klik, di mana diantara klik-klik itu ada yang tidak bisa dijamin kesterilannya terhadap oposisi-oposisi dari luar, entah itu berupa sosok anggota baru, anggota biasa, anggota pengelola atau anggota yang sengaja ditanam sejak awal. (Hasil wawancara dengan Kasat Intelkam Polres Salatiga Mohammad Bisri SE, 20 Februari 2019)

Penjelasan selanjutnya yang disampaikan oleh Kasat Intelkam, Mohammad Bisri SE, terkait dengan isi pembicaraan agen yang diterjunkan ke sasaran diketahui dapat menjadi sebuah bom

provokasi yang dapat menyulitkan organisasi/lembaga. Berikut ini penjelasan selengkapnya:

Dampak lain akibat bocornya informasi dari agen penyusup ini selanjutnya akan mampu menjadi sebuah bom provokasi yang dapat menyulitkan organisasi. Hal ini dapat terjadi demikian karena dengan modal sedikit bocoran informasi saja, informasi ini dapat dirakit menjadi kondisi yang sangat menyulitkan organisasi. Dampak selanjutnya akibat bocornya informasi dari agen penyusup ini akan mudah digunakan oleh pihak sasaran (ketika mereka sudah mencurigai keberadaan penyusup di lingkungan mereka) untuk mencari orang-orang yang memiliki tugas dalam aktivitas intelijen, akibat agen tersebut yang banyak bicara, memamerkan banyak aktifitasnya, daripada mencari orang-orang atau agen intelijen yang berkarakter, yang bisa melakukan segala sesuatunya secara terukur. Oleh karena itu, dalam kegiatan perencanaan hingga pengorganisasian, di tahap penyusupan ini yang perlu diperhatikan adalah setiap anggota harus memahami betul tentang kepemimpinan, memilih pemimpin, strategi pengaturan posisi atau komposisi dalam penyusunan anggota pelaksana, dan peningkatan disiplin serta pengamanan terhadap hal-hal yang bersifat rahasia. (Hasil wawancara dengan Kasat Intelkam Polres Salatiga Mohammad Bisri SE, 20 Februari 2019)

Penjelasan serupa terkait dalam perencanaan hingga pengorganisasian pada tahap penyusupan di kegiatan penggalangan intelijen ini, juga diberikan pembekalan terhadap agen yang ditunjuk terlebih dahulu. Hal ini sesuai yang disampaikan oleh Dengan Anggota Sat Intelkam, Briptu Muhammad Idris, berikut ini:

Dalam penerjunan agen terpilih tersebut, kami juga memberikan pembinaan terlebih dahulu terkait masalah yang

berlebihan terhadap suatu masalah secara umum, dimana dengan adanya pembinaan ini kami melatih anggota dalam menentukan sikap di daerah sasaran nanti mana kala mereka nanti menghadapi isu atau permasalahan baru yang tidak terduga sebelumnya. Hal ini kami lakukan karena biasanya pada kegiatan peyusupan di lapangan sering kali terjadi isu yang berkembang di masyarakat. Oleh karena itu, dalam menyikapi isu atau pokok persoalan yang diciptakan oleh pihak asing, diharapkan agen penyusup dapat bersikap bijak dan tidak bereaksi cepat di masyarakat, dengan cara melakukan proses pemeriksaan, melakukan penelitian singkat, melakukan penelitian silang, dan melakukan koordinasi antar personil secara internal organisasi, serta melakukan koordinasi antar organisasi atau kelembagaan. Menurut kami sikap bijak yang sesuai prosedur ini tidak terlalu sulit dilakukan oleh agen terpilih jika dilakukan secara hati-hati dalam langkah dan tindakannya. (Hasil wawancara dengan Anggota Sat Intelkam, Briptu Muhammad Idris, 20 Februari 2019)

Penjelasan selanjutnya yang diberikan oleh Anggota Sat Intelkam, Briptu Muhammad Idris, juga diketahui bahwa dalam menyikapi permasalahan (isu yang diciptakan maupun fakta) di lapangan sebaiknya agen penyusup mampu membuat *feedback* terhadap permasalahan (isu yang diciptakan maupun fakta) yang ada, sehingga ia (agen penyusup) tidak dapat dimanfaatkan oleh pihak lawan. Berikut ini penjelasan selengkapnya:

Perlu diketahui, meskipun persoalan-persoalan yang dilansir di berbagai media itu ada yang faktual, tetapi banyak juga yang masih berupa data yang belum dapat dipastikan kebenarannya. Bahkan lebih celaka lagi jika isu yang dilempar oleh pihak lain itu baru sebatas operasi intelijen untuk mendapatkan umpan

balik dari pihak-pihak atau jaringan yang menjadi target mereka. Untuk memperbaiki cara kerja yang kontra produktif itu maka kami menerapkan sikap disiplin dalam setiap keadaan yang mengharuskan kami untuk tunduk pada konstitusi negara, sehingga agen kami nanti tidak menjadi bulan-bulanan dan bahan tertawaan pihak asing. (Hasil wawancara dengan Anggota Sat Intelkam, Briptu Muhammad Idris, 20 Februari 2019)

Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat diketahui bahwa dalam tahap penyusupan ini diterapkan langkah perencanaan hingga pengorganisasian yang disertai dengan menetapkan anggota terpilih atau agen terpilih berdasarkan standar kriteria intelijen yang telah ditetapkan sebelumnya untuk diterjunkan ke daerah sasaran. Di mana standar-standar tersebut berupa kemampuan, sikap disiplin dan kebijakan dalam menghadapi suatu masalah. Kelemahan dalam kegiatan penyusupan ini diketahui bahwa ketika agen penyusup mengalami permasalahan di lapangan, ia tidak terbiasa berfikir dan bertindak dengan cepat dengan tetap memperhatikan standar prosedur operasi yang dimiliki untuk mengatasi permasalahannya tersebut.

4.3.2.1 Tahap Penceraiberaian

Berdasarkan hasil pengamatan diketahui bahwa mekanisme kedua dalam kegiatan pengalangan intelijen dalam pencegahan penyebaran hoax menjelang masa Pilpres 2019 dilakukan dengan kegiatan penceraiberaian sasaran. Penceraiberaian sasaran adalah kegiatan penghancuran sasaran yang dilakukan oleh agen penyusup atau agen penetrasi. Kegiatan penceraiberaian sasaran sesuai dengan penjelasan Kanit Intelkam II, Aiptu Toto Juhata dilakukan dengan aksi penghancuran di segala bidang yang selanjutnya berdampak

munculnya aksi kriminalitas dan ancaman gangguan Kamtibmas di daerah sasaran. Hal ini sesuai dengan penjelasan sebagai berikut:

Kegiatan penghancuran sasaran dilakukan oleh para agen action/penetrasi yang telah mendapatkan kepercayaan dari lingkungan yang menjadi sasarannya. Kegiatan penghancuran sasaran ini dilakukan dengan jalan menimbulkan berbagai ketegangan, konflik sosial, ataupun konflik politik. Kegiatan penghancuran sasaran juga dapat dimulai dari adanya pertentangan minoritas dan mayoritas yang dibuat semakin meruncing, penggalakkan ekstrimitas agama, aliran golongan, organisasi dan partai yang ada di dalam organisasi kemasyarakatan (Ormas) tersebut. Kemudian unsur-unsur tersebut digiring sedemikian rupa ke dalam suasana perang urat syaraf, sehingga akan melahirkan pertentangan massa dan pertarungan fisik yang selanjutnya dapat berkembang menjadi sebuah kekacauan. Dampak dari kehancuran tersebut selanjutnya akan membuat maraknya aksi perampokan, pencurian, penodongan ataupun aksi-aksi yang mengandung unsur-unsur pidana didalamnya, yang selanjutnya menimbulkan kekalutan yang seakan-akan terjadi di mana-mana. (Hasil wawancara dengan Kanit Intelkam II, Aiptu Toto Juhata, 21 Februari 2019)

Berdasarkan hasil wawancara selanjutnya juga diketahui bahwa kegiatan penceraiberaian sasaran dilakukan dengan cara penghancuran di segala bidang. Hal ini sesuai dengan kutipan wawancara berikut ini:

Penceraiberaian sasaran juga dilakukan dengan cara penghancuran di segala bidang seperti ideologi, politik, ekonomi, sosioal budaya, militer, keamanan dan agama akibat dari kehancuran tersebut terjadilah intimidasi dan tuduh-

menuduh. Kolaborasi-kolaborasi kehancuran dari berbagai aspek tersebut terus dilakukan oleh agen penetrasi dengan mengobarkan provokasi kepada anggota organisasi kemasyarakatan (Ormas) tersebut, tentang adanya gerakan-gerakan dari kelompok lainnya dan hasutan terhadap kaum buruh yang kemudian digiring untuk berdemonstrasi dan melakukan pemogokan dengan dalih perbaikan nasib. (Hasil wawancara dengan Kanit Intelkam II, Aiptu Toto Juhata, 21 Februari 2019)

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa sasaran dari tahap penceraiberaian ini adalah individu dan kelompok masyarakat yang rentan dengan berbagai informasi hoax yang diberikan oleh agen penetrasi tersebut. Penjelasan tersebut juga sesuai dengan hasil wawancara berikut ini:

Kegiatan penceraiberaian ini juga dilakukan kepada individu dan kelompok masyarakat tersebut. Setelah tidak ada titik temu yang diperoleh oleh individu dan masyarakat tersebut (Hasil wawancara dengan Kanit Intelkam II, Aiptu Toto Juhata, 21 Februari 2019)

Berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Kanit Intelkam I, Aiptu Agung Bayu SN., diketahui bahwa dampak dari aksi penceraiberaian yang dilakukan oleh agen penetrasi tersebut adalah munculnya tekanan pemenangan kepentingan kelompok tertentu. Hal ini sesuai kutipan wawancara sebagai berikut:

Dalam keadaan yang serba kacau, kolaborasi dari para kelompok agen penetrasi ini kemudian akan memanfaatkan tekanan-tekanannya untuk memenangkan kepentingannya. Apabila mereka tidak mau memenuhi permintaannya, maka dikeluarkanlah berbagai ancaman sehingga secara sistematis

penguatan individu dan kelompok masyarakat ini akan rontok dengan sendirinya. (Hasil wawancara dengan Kanit Intelkam I, Aiptu Agung Bayu SN., 21 Februari 2019)

Berdasarkan hasil wawancara selanjutnya juga diketahui bahwa dampak dari tahap penceraiberaian dalam kegiatan penggalangan intelijen ini adalah terjadinya kerusakan struktural. Hal ini sesuai dengan pernyataan Kasat Intelkam, Mohammad Bisri SE sebagai berikut:

Dampak dari tahap penceraiberaian pada kegiatan penggalangan intelijen ini biasanya teradi kerusakan struktural. Kerusakan struktural yang sudah sampai pada tahap seperti ini memang akan memakan waktu entah berapa generasi untuk memperbaikinya, sehingga hal ini akan mampu membuat orang yang masih baik-baik dan masih punya idealisme menjadi putus asa, sehingga turut menambah kelemahan negara. Kondisi ini apabila sudah meradang maka akan teradi kerusakan struktural jika mereka tidak ingin belajar dan mau mengetahui tentang operasi intelijen. (Hasil wawancara dengan Kasat Intelkam Polres Salatiga Mohammad Bisri SE, 20 Februari 2019)

Penjelasan mengenai dampak negatif dari aksi penceraiberaian dalam aksi penggalangan intelijen selajutnya juga dapat diatasi dengan operasi intelijen pula, yang mana hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

Yang harus dipahami dari dampak negatif aksi penggalangan intelijen dalam kegiatan operasi intelijen hanya bisa dilawan dengan operasi intelijen pula. Jika dukungan negara ini terhadap Lembaga/Badan Intelijen Negara lemah di tambah lagi dengan anggota legislatif yang tidak memahami tentang

ilmu intelijen maka kerusakan struktural cepat atau lambat akan menjadi bakteri yang mematikan negara tersebut. (Hasil wawancara dengan Kasat Intelkam Polres Salatiga Mohammad Bisri SE, 20 Februari 2019)

Berdasarkan hasil penelitian di atas dapat diketahui bahwa kegiatan penceraiberaian yang ada dalam tahapan penggalangan intelijen berdampak pada kerusakan sistemik mulai dari hulu hingga hilir di berbagai aspek yang selanjutnya berdampak pada hilangnya rasa kepercayaan diantara kelompok masyarakat sehingga berdampak akhir pada terpecahbelahnya sekelompok masyarakat tersebut.

4.3.2.2 Tahap Pengingkaran

Tahap pengingkaran memiliki tujuan agar setiap individu ingkar terhadap para pemimpinnya, jika misi itu berhasil, maka massa kelompok masyarakat akan menjadi liar dan terlepas dari segala ikatan. Penjelasan ini sesuai dengan kutipan wawancara berikut ini:

Biasanya tujuan pengingkaran ialah agar setiap individu ingkar terhadap para pemimpinnya, yaitu ingkar terhadap pemimpin kelompok masyarakat. Pengingkaran itu diharapkan bisa melanda pemimpin agama, mengikat lagi terhadap agama, organisasi dan ideologi politiknya, dan akhirnya masyarakat tidak lagi peduli kepada tujuan kelompoknya tersebut. Jika misi itu berhasil, maka massa akan menjadi liar, seakan terlepas dari segala ikatan. Tiada lagi rasa cinta kepada organisasi tersebut, tiada belas kasihan kepada sesama rekannya, maupun perintah pimpinan di organisasi tersebut. Rakyat tidak percaya lagi kepada pimpinan agama, ideologi organisasi, politik partai, hingga loyalitasnya luntur dan patriotismenya lenyap. Agen-agen penggalang ini kemudian terus menuggangi mereka, menghalaunya ke arah yang dikehendaknya. Kemudian agen ini kemudian memberikan keyakinan baru, bahwa masih ada

ideologi yang lebih baik. (Hasil wawancara dengan Kanit Intelkam III, Aiptu Agus Saryanto, 21 Februari 2019)

Berdasarkan hasil wawancara selanjutnya juga diketahui bahwa dengan adanya aksi penggalangan yang dilakukan oleh agen penetrasi ini kemudian, kelompok masyarakat akan merubah ideologinya sesuai dengan keyakinan yang baru, yang mana hal ini sesuai dengan hasil wawancara sebagai berikut:

Dengan adanya aksi penggalangan yang dilakukan oleh agen penetrasi ini kemudian, kelompok masyarakat akan merubah ideologinya sesuai dengan keyakinan yang baru, sehingga masyarakat dan negara bisa diperbaiki. (Hasil wawancara dengan Kanit Intelkam III, Aiptu Agus Saryanto, 21 Februari 2019)

Berdasarkan hasil wawancara selanjutnya juga diketahui terdapat dalam tahap pengingkaran ini akan muncul ideologi baru yang tidak sesuai dengan ideologi organisasi yang telah ada selama ini. Penjelasan tersebut sesuai dengan hasil wawancara berikut ini:

Dalam tahap pengingkaran biasanya terdapat suatu kondisi yang berbeda manakala persatuan dan kesatuan dalam kelompok masyarakat tersebut jika sudah terlanjur ambruk, apalagi kepercayaan diri sudah sirna, maka para pemimpin yang bingung tersebut akan segera goyah pendiriannya dan akhirnya terpengaruh. Orang yang dulunya mempunyai idealisme tinggi, mempunyai pengaruh, terutama di kalangan kelompok masyarakat tersebut, kini terpukau oleh pandangan dan ideologi alternatif yang mana akan tetap dianggap asing jika diterapkan di wilayah ini. Kemudian berdasarkan kondisi inilah pimpinan kelompok masyarakat tersebut dianggap sebagai pengkhianatan karena ia mengkhianati ideologi

organisasinya sendiri dan menterjemahkannya sendiri dengan kecerdasannya tanpa belajar dari sejarah masa lalu. (Hasil wawancara dengan Kanit Intelkam III, Aiptu Agus Saryanto, 21 Februari 2019)

Berdasarkan beberapa penjelasan dari hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa dalam tahap pengingkaran terjadi proses perubahan ideologi di kelompok masyarakat hingga ke unsur pimpinan kelompok masyarakat, dimana munculnya ideologi baru yang dianut oleh pimpinan kelompok masyarakat tersebut apabila tidak diterapkan dengan bijaksana akan merubah kondisi, yang selanjutnya mampu menjustifikasi pimpinan kelompok masyarakat tersebut sebagai pengkhianat di lingkungan kelompok masyarakat tersebut.

4.3.2.3 Tahap Pengarahan

Setelah melaksanakan tahap pengingkaran, tahapan selanjutnya yang dilakukan adalah tahap pengarahan. Pengarahan ini diberikan kepada masyarakat, para pemimpin dan kepada kelompok yang ulah tersebut atas kondisi keadaan yang harus diterima oleh masyarakat tersebut. Penjelasan ini sesuai dengan hasil wawancara yang dijelaskan oleh Kanit Intelkam III, Ipda Yaqin, sebagai berikut:

Tahapan pengarahan ini adalah langkah pemberian pengarahan kepada masyarakat, para pemimpin dan kepada kelompok yang berunjuk rasa tersebut atas keadaan yang harus diterima, yaitu menerima kenyataan yang ada setelah dilakukan langkah-langkah penggalangan oleh para agen jaringan penetrasi penggalangan secara terselubung (Hasil wawancara dengan Kanit Intelkam III, Aiptu Agus Saryanto, 21 Februari 2019)

Berdasarkan hasil wawancara selanjutnya juga diketahui bahwa dalam tahap pengarahan dilakukan secara tertutup. Hal ini sesuai dengan pernyataan sebagai berikut:

Pelaksanaan kegiatan pengarahan secara terbuka harus dihindari, karena hal ini akan dapat menyinggung perasaan masyarakat dan memancing kemarahan massa. Jika hal itu dilakukan juga, sudah hampir pasti dalam kegiatan pengarahan ini akan mendapat tantangan yang hebat dari masyarakat. Namun, sebenarnya kekacauan masyarakat itulah yang kemudian dapat memberi arah tersendiri kepada tujuan penggalangan, sehingga dukungan massa dan dukungan dari orang-orang yang berpengaruh dapat diperoleh. (Hasil wawancara dengan Kanit Intelkam III, Aiptu Agus Saryanto, 21 Februari 2019)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa dalam tahap pengarahan ini pemberian pengarahan kepada masyarakat, para pemimpin dan kepada kelompok yang berunjuk rasa tersebut atas keadaan yang harus diterima. Tujuannya adalah agar agen penetrasi memperoleh dukungan massa dan dukungan dari orang-orang yang berpengaruh di lingkungan masyarakat tersebut.

4.3.2.4 Tahap Pengusut Kesetiaan

Langkah selanjutnya dalam mekanisme penggalangan intelijen adalah tahap pengusutan kesetiaan. Berdasarkan hasil wawancara, diketahui bahwa tahap pengusutan kesetiaan dapat dilakukan dengan cara pemberian kepastian dan keyakinan sebagai jaminan sponsor (*handler*) bahwa tidak dilakukannya penghianatan ataupun munculnya agen baru (*double agen*). Pernyataan tersebut sesuai dengan hasil wawancara berikut ini:

Tahap selanjutnya dalam mekanisme penggalangan intelijen adalah tahap pengusutan kesetiaan, yaitu kegiatan yang dilakukan untuk memberikan kepastian dan keyakinan sebagai jaminan sponsor (*handler*) bahwa tidak dilakukannya penghianatan ataupun munculnya agen baru (*double agen*). (Hasil wawancara dengan Kanit Intelkam III, Aiptu Agus Saryanto, 21 Februari 2019).

4. Tahap Penggeseran

Tahapan selanjutnya dalam mekanisme penggalangan intelijen adalah tahap penggeseran. Penjelasan mengenai tahap penggeseran adalah penggeseran kedudukan pemimpin atau tokoh masyarakat yang ada di kelompok masyarakat tersebut dengan menggunakan kekuatan atau paksaan yang dilakukan secara terbuka, untuk digantikan dengan tokoh pimpinan yang baru, yang sealiran dengan ideologi yang baru. Penjelasan tersebut sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan kepada Anggota Sat Intelkam, Briptu Muhammad Idris, berikut ini:

Tahapan penggeseran ialah menggeser kedudukan pemimpin atau tokoh masyarakat yang ada di kelompok masyarakat tersebut dengan menggunakan kekuatan atau paksaan yang dilakukan secara terbuka, untuk digantikan dengan yang baru, yang sealiran dengan ideologi baru. Penggeseran ini dilakukan dengan perhitungan-perhitungan yang matang. Besarnya dukungan dari berbagai golongan harus dipertimbangkan, sebagaimana bisa dilihat dari hasil-hasil penggalangan pada tahap-tahap yang lalu. Untuk itu opini masyarakat harus digiring sehingga menjadi dukungan kekuatan. Maka dibuatlah suatu skenario penggulingan kekuasaan itu dapat dilakukan pada waktu yang tepat. (Hasil wawancara dengan

Anggota Sat Intelkam, Briptu Muhammad Idris, 20 Februari 2019)

Berdasarkan hasil wawancara selanjutnya juga diketahui bahwa dalam aksi penggeseran ini diberikan dana dan sponsor. Hal ini sesuai dengan penjelasan berikut ini:

Dalam pelaksanaan penggeseran selanjutnya dipersiapkan bantuan dari penggalang dana dan sponsor. Setelah persiapannya matang, barulah dilangsungkan perebutan kekuasaan secara paksa kepada para tokoh dan pemimpin yang tidak sealian dengan ideologi baru yang dipandang sebagai ekstremis, separatis dan teroris atau diduga telah melakukan suatu tindak pidana sehingga bisa digiring ke penjara atau bahkan dilenyapkan. (Hasil wawancara dengan Anggota Sat Intelkam, Briptu Muhammad Idris, 20 Februari 2019)

Berdasarkan hasil wawancara selanjutnya juga diketahui bahwa dalam tahapan penggeseran ini, dalam skala nasional, bangsa Indonesia mengalami berbagai problematika. Hal ini sesuai dengan penjelasan sebagai berikut:

Meskipun pada awal kiprahnya di tahapan penggeseran rata-rata memiliki idealisme yang memadai, namun pada saat karirnya menanjak, pengikutnya bertambah, organisasi tersebut akan memiliki bayangan kemapanan yang mulai menggoda dan turut mewarnai kehidupannya. Contoh dalam skala nasional, pihak asing menaklukkan Indonesia dengan merusak budaya-adat istiadat, memecah belah persatuan dan memecah-belah persatuan para pemimpin dengan ilmu dan organisasi intelijennya dengan cara memainkan kedua sifat Infiltrasi dan penetrasi. Akhirnya hal ini berdampak pada lahirnya budaya hidup mapan dengan korupsi, mabuk

kenikmatan, melupakan pendidikan, melupakan jatah lapangan kerja dan pendidikan putra-putri orang kecil, orientasi bisnis hanya sebatas keamanan simpanan dan keuntungan investasi. Kesemuanya berlawanan dengan sistem perjuangan bangsa, karena dana dan sponsor ini tidak dapat dipakai untuk menggerakkan program pembangunan nasional yang tertuang dalam pembukaan UUD 1945 dan nilai-nilai luhur ideologi negara Pancasila. (Hasil wawancara dengan Anggota Sat Intelkam, Briptu Muhammad Idris, 20 Februari 2019)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa penggeseran kedudukan pimpinan atau tokoh masyarakat yang ada di kelompok masyarakat dapat dilakukan dengan menggunakan kekuatan atau paksaan yang dilakukan secara terbuka, untuk digantikan dengan tokoh pimpinan yang baru, yang sealiran dengan ideologi yang baru. Selain itu dalam tahap penggeseran ini juga dapat digunakan dana dan sponsor untuk pengorganisasian intelijen, peningkatan keahlian, keterampilan, dan keuletan, serta peningkatan mutu pendidikan, memelihara persatuan dan kesatuan dan pemanfaatan dana dan sponsor tersebut yang sesuai dengan isi pembukaan UUD 1945 dan nilai-nilai luhur ideologi negara Pancasila.

4.3.2.5 Tahap Penggabungan

Tahapan penggabungan adalah menggabungkan kembali kelompok masyarakat yang terpecahbelah akibat tahapan penggalangan intelijen yang sebelumnya, sehingga kelompok tersebut kembali bersatu dalam kelompok masyarakat yang sesuai dengan organisasi sponsor. Penjelasan yang demikian sesuai dengan hasil wawancara berikut ini:

Tahapan penggabungan ialah menggabungkan kelompok sasaran kepada kelompok sponsor setelah berhasilnya penggeseran, yaitu perebutan kekuasaan dan penggulingan kekuasaan pemerintahan yang ada di dalam kelompok masyarakat yang sebelumnya. Sehingga hal ini berdampak pada ketidakberdayaan masyarakat. Masyarakat hanya menjadi pengikut saja, tidak berani membantah dan protes, serta tidak ada lagi patriotisme ataupun perlawanan. (Hasil wawancara dengan Anggota Sat Intelkam, Briptu Muhammad Idris, 20 Februari 2019)

Berdasarkan kondisi di atas dapat diketahui bahwa dalam tahap penggabungan ini terjadi penggabungan kelompok sasaran kepada kelompok sponsor setelah dilakukannya penggeseran kekuasaan kelompok organisasi sebelumnya, yang mana tahapan ini dinyatakan berhasil manakala masyarakat menjadi pengikut kelompok atau organisasi yang berhasil dibentuk oleh agen penetrasi yang baru, dan masyarakat tidak berani membantah, protes, serta tidak ada lagi patriotisme ataupun perlawanan dari pihak tersebut. Dengan kondisi tersebut maka dapat diketahui bahwa tahapan-tahapan yang ada dalam penggalangan intelijen dapat dinyatakan telah selesai.

Namun setelah tahapan-tahapan penggalangan intelijen selesai, langkah selanjutnya yang harus dilakukan adalah melakukan pengawasan. Pengawasan sangat perlu dilakukan secara ketat dan teliti untuk mencegah terjadinya gangguan dan hambatan situasional yang kurang menguntungkan dalam pencapaian tujuan, yang mana hal ini juga sesuai dengan pernyataan Kasat Intelkam, Mohammad Bisri SE, sebagai berikut:

Pengawasan dan pengamanan sangat diperlukan, karena itu harus dilakukan secara ketat dan teliti. Hal itu dipandang penting, karena berguna untuk mencegah terjadinya gangguan

dan hambatan situasional yang kurang menguntungkan dalam pencapaian tujuan. Untuk melakukan penyelidikan terhadap orang-orang atau masyarakat, pada umumnya dipasang mata-mata, terutama di daerah yang dianggap rawan konflik sosial. Kemudian juga dilakukan langkah pembinaan dengan kebijakan baru yang ditetapkan oleh pemimpin baru dengan maksud menciptakan manusia baru, serta terus melakukan publikasi dan menerapkan kebijakan tersebut secara merata di segenap lapisan masyarakat. (Hasil wawancara dengan Kasat Intelkam Polres Salatiga Mohammad Bisri SE, 20 Februari 2019)

Berdasarkan hasil wawancara selanjutnya juga diketahui bahwa semua kegiatan dan operasi penggalangan intelijen dapat dilakukan dengan cara memakai sarana-sarana penggalangan yang cocok dengan sasaran dan situasi yang aktual, yang mana hal ini sesuai dengan kutipan wawancara berikut ini:

Semua kegiatan dan operasi penggalangan intelijen dapat dilakukan dengan cara memakai sarana-sarana penggalangan yang cocok dengan sasaran dan situasi yang aktual. Dengan demikian dapat dipahami mengapa penggalangan intelijen terkadang sangat sulit untuk dilaksanakan dengan sedemikian rupa. (Hasil wawancara dengan Kasat Intelkam Polres Salatiga Mohammad Bisri SE, 20 Februari 2019)

Berdasarkan hasil penjelasan di atas dapat diketahui bahwa pelaksanaan penggalangan intelijen yang ditujukan untuk pencegahan penyebaran hoax menjelang masa Pilpres 2019 di wilayah hukum Polres Salatiga dilakukan melalui 7 (tujuh) tahapan yaitu penyusupan dimana dalam tahap penyusupan ini dilakukan perencanaan hingga pengorganisasian khususnya dalam penetapan agen penyusup atau agen penetrasi, penceraiberaian, pengingkaran,

pengarahan, pengusutan kesetiaan, penggeseran, penggabungan serta dalam kegiatan penggabungan ini dilanjutkan dengan proses pengawasan.

VII. EVALUASI & PELAPORAN PELAKSANAAN PENGALANGAN INTELIJEN

Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penggalangan intelijen merupakan mekanisme terakhir dalam penggalangan intelijen. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penggalangan intelijen dilakukan dengan cara membuat laporan pelaksanaan penggalangan pada dasarnya berisi tentang pokok-pokok rencana penggalangan, laporan pelaksanaan penggalangan, hasil yang dicapai serta analisa dan evaluasinya. Dimana dari hasil analisa ini akan diperoleh analisa mengenai pelaksanaan penggalangan dan analisa terhadap hasil yang dicapai dari pelaksanaan penggalangan intelijen. Sedangkan evaluasi dari pelaksanaan penggalangan intelijen ini nantinya akan diketahui efek atau dampak yang timbul setelah dilaksanakannya operasi penggalangan, efek sejauh mana operasi penggalangan dapat mempengaruhi keadaan sasaran penggalangan, serta daya dan hasil guna pelaksanaan operasi penggalangan. Penjelasan tersebut sesuai dengan kutipan wawancara berikut ini:

Evaluasi dan pelaporan dalam mekanisme penggalangan intelijen ini dilakukan dengan cara membuat laporan pelaksanaan penggalangan pada dasarnya berisi tentang pokok-pokok rencana penggalangan intelijen, laporan pelaksanaan penggalangan, hasil yang dicapai serta analisa dan evaluasinya. (Hasil wawancara dengan Anggota Sat Intelkam, Briptu Muhammad Idris, 20 Februari 2019)

Dari hasil wawancara selanjutnya juga dijelaskan bahwa dalam analisa pelaksanaan penggalangan intelijen adalah analisa terhadap tahap-tahap pelaksanaan penggalangan intelijen yang meliputi 7 (tujuh) tahap penggalangan intelijen, dan analisa mengenai hasil yang dicapai dari pelaksanaan penggalangan intelijen. Dimana pernyataan tersebut sesuai dengan kutipan hasil wawancara berikut ini:

Analisa pelaksanaan penggalangan intelijen adalah analisa terhadap tahap-tahap pelaksanaan penggalangan intelijen yang meliputi 7 (tujuh) tahap penggalangan intelijen, dan analisa mengenai hasil yang dicapai dari pelaksanaan penggalangan intelijen. (Hasil wawancara dengan Anggota Sat Intelkam, Briptu Muhammad Idris, 20 Februari 2019)

Kasat Intelkam juga menjelaskan bahwa evaluasi dari pelaksanaan penggalangan intelijen meliputi evaluasi mengenai efek atau dampak yang timbul setelah dilaksanakannya operasi penggalangan, efek sejauh mana operasi penggalangan dapat mempengaruhi keadaan sasaran penggalangan, serta daya dan hasil guna pelaksanaan operasi penggalangan. Penjelasan selegkapnya dari kutipan wawancara yang dilakukan kepada Kasat Intelkam disajikan sebagai berikut:

Evaluasi dari pelaksanaan penggalangan intelijen ini nantinya akan diketahui efek atau dampak yang timbul setelah dilaksanakannya operasi penggalangan, efek sejauh mana operasi penggalangan dapat mempengaruhi keadaan sasaran penggalangan, serta daya dan hasil guna pelaksanaan operasi penggalangan. (Hasil wawancara

dengan Kasat Intelkam, Mohammad Bisri SE, 20 Februari 2019)

Berdasarkan penjelasan di atas dapat diketahui bahwa mekanisme penggalangan intelijen dilakukan melalui perencanaan, pelaksanaan penggalangan dan evaluasi serta pelaporan dari aksi penggalangan intelijen, dimana dalam perencanaan ini dilakukan dengan cara perencanaan sasaran, perencanaan pelaksanaan, perencanaan tujuan/hasil, perencanaan pengawasan dan perencanaan pelaporan. Sedangkan dalam pelaksanaan penggalangan intelijen dilakukan melalui 7 (tujuh) tahapan antara lain penyusupan, penceraiberaian, pengingkar, pengarah, pengusutan kesetiaan, penggeseran, penggabungan serta pengawasan. Sedangkan mekanisme yang terakhir adalah evaluasi dan pelaporan dari pelaksanaan penggalangan yang berisi tentang laporan pokok-pokok rencana penggalangan, laporan pelaksanaan penggalangan, laporan hasil yang dicapai serta analisa mengenai pelaksanaan penggalangan, analisa terhadap hasil yang dicapai dari pelaksanaan penggalangan intelijen dan evaluasi dari pelaksanaan penggalangan intelijen terkait efek atau dampak yang timbul setelah dilaksanakannya operasi penggalangan, efek operasi penggalangan terhadap keadaan sasaran, serta daya dan hasil guna pelaksanaan operasi penggalangan.

IX. FAKTOR-FAKTOR PENGGALANGAN INTELIJEN DALAM PENCEGAHAN PENYEBARAN HOAX MENJELANG MASA PEMILIHAN PRESIDEN DI WILAYAH HUKUM POLRES SALATIGA

Menurut GR Terry (2009: 15-21), dalam pelaksanaan strategi manajemen dipengaruhi oleh adanya faktor *man, money, methode,*

material, machine and market. Sependapat dengan penjelasan itu pula, diketahui bahwa dalam pelaksanaan penggalangan intelijen ini dipengaruhi oleh faktor-faktor tersebut, yang mana hal ini dapat dijelaskan berikut ini:

1. Faktor Internal

Faktor internal yang mempengaruhi dalam penggalangan intelijen dalam pencegahan penyebaran hoax menjelang masa pemilihan presiden di wilayah hukum Polres Salatiga berasal dari sumber daya manusia anggota Satuan Intelkam Polres Salatiga (SDM), pemilihan metode yang diterapkan dalam penggalangan intelijen, anggaran dan sarana prasarana. Penjelasan selengkapnya adalah sebagai berikut:

a. SDM

Berdasarkan hasil pengamatan peneliti, diketahui bahwa gambaran kemampuan SDM atau anggota Satuan Intelkam Polres Salatiga dalam melakukan penggalangan intelijen dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Keterampilan

Keterampilan anggota Satuan Intelkam Polres Salatiga dalam melakukan penggalangan intelijen diketahui sangat minim. Hal ini dapat diidentifikasi berdasarkan kondisi sebagai berikut:

a) Kurang maksimalnya anggota dalam menguasai teknik penggalangan, khususnya dalam prosedur:

(1) Propaganda melalui penyebaran pernyataan atau gagasan-gagasan

(2) Kampanye berbisik untuk melawan isu negatif

- (3) Penyebaran rumor ke dalam lingkungan kelompok masyarakat tertentu untuk menimbulkan keraguan terhadap loyalitas kelompok.
 - (4) Penggunaan isu.
 - (5) Penggunaan gosip untuk menciptakan pengingkaran kelompok terhadap integritas pimpinan kelompok
 - (6) Kegiatan mempengaruhi pikiran oknum atau kelompok yang menentang penegak hukum
 - (7) Memanfaatkan kelemahan atau kerawanan ekonomi untuk mempengaruhi sasaran
 - (8) melakukan kegiatan untuk menimbulkan ketidakstabilan atau tindakan melawan aturan atau hukum di kalangan kelompok-kelompok sasaran.
- b) Kemampuan penentuan tema yang belum diimbangi dengan penggunaan media penyampai pesan yang tepat. Media penyampaian pesan yang digunakan sederhana yaitu melalui selebaran, spanduk dan media massa.
 - c) Pelaksanaan penggalangan belum mendapat dukungan anggaran untuk mendukung kegiatan dan memperoleh peralatan yang dibutuhkan.
 - d) Belum adanya ketetapan hati yang mantap bagi personil untuk dapat melakukan penggalangan intelijen.
- 2) Sikap perilaku
- Sikap dan perilaku anggota Satuan Intelkam Polres Salatiga dalam melakukan penggalangan intelijen masih memiliki kondisi sebagai berikut:
- a) Masih ditemukan perilaku anggota penggalangan yang tidak memperhatikan faktor keamanan perorangan, kegiatan dan keamanan bahan keterangan dalam melakukan penyebaran pesan.

- b) Rasa takut yang "berlebihan" dari personil pada saat menjalankan teknik dan taktik penggalangan.
- c) Kurangnya kepekaan dari personil dalam menentukan media yang efektif menyampaikan pesan kepada sasaran.

Hasil pengamatan di atas juga didukung dengan hasil wawancara yang dilakukan kepada Kasat Intelkam sebagai berikut:

Saat ini kemampuan anggota Satuan Intelkam Polres Salatiga dalam melakukan penggalangan intelijen masih minim. Hal ini terjadi karena anggota kami yang biasanya yang sudah memiliki kemampuan yang cukup, dipindahtugaskan ke fungsi lain, sehingga kami mendapat ganti anggota yang baru dengan kemampuan yang minim. Akibat sering terjadinya *mutasi* anggota ini, kemampuan anggota dalam pelaksanaan penggalangan intelijen menjadi kurang. (Hasil wawancara dengan Kasat Intelkam, Mohammad Bisri SE, 20 Februari 2019)

Berdasarkan hasil pengamatan dan hasil wawancara di atas, dapat diketahui bahwa kemampuan SDM yang melakukan penggalangan intelijen memiliki keterampilan yang kurang, pengetahuan yang minim serta sikap dan perilaku yang kurang tepat, yang mana hal ini disebabkan oleh adanya seringnya mutasi atau *mutasi* anggota dari satu fungsi ke fungsi lainnya.

Berdasarkan temuan penelitian diketahui bahwa terdapat kurangnya kemampuan anggota dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang ada di tahapan penggalangan intelijen dalam pencegahan hoax menjelang masa Pilpres 2019 di wilayah hukum Polres Salatiga yang dilakukan oleh Satuan Intelkam Polres Salatiga. Anggota pelaksana kegiatan penggalangan intelijen dalam pencegahan hoax menjelang masa Pilpres 2019 di wilayah hukum Polres Salatiga ini merupakan bagian penentu keberhasilan terlaksananya kegiatan penggalangan

intelijen. Apabila dalam pelaksanaannya tidak didukung dengan kemampuan anggota yang cukup dan berperan aktif dalam menjalankan tugasnya, maka aksi penggalangan tidak akan berhasil, dan akan terjadi kebocoran informasi yang selanjutnya akan berdampak buruk pada situasi pemerintahan yang ada di wilayah hukum Polres Salatiga. Dimana dampak selanjutnya adalah akan terjadi amukan warga masyarakat yang semakin menjadi-jadi.

Kendala selanjutnya juga berasal dari seringnya terjadi pergantian anggota Satuan Intelkam, seperti anggota yang telah memiliki kemampuan cukup dalam pelaksanaan penggalangan, kemudian dipindah ke fungsi lain seperti ke fungsi Lantas, dan begitu sebaliknya, yang mana hal ini menyebabkan tidak adanya anggota tetap sebagai agen penggalangan intelijen. Hal ini dapat menjadi faktor penghambat terlaksananya kegiatan penggalangan intelijen dalam pencegahan hoax menjelang masa Pilpres 2019 di wilayah hukum Polres Salatiga yang dilakukan oleh Satuan Intelkam Polres Salatiga.

Untuk mengatasi adanya kendala tersebut, maka hal yang harus dilakukan oleh Kasat Intelkam adalah membuat program khusus, yang didukung oleh personil dengan kemampuan yang cukup sebagai salah satu strategi yang tepat untuk mencegah mutasi anggota tersebut, agar Satuan Intelkam memiliki anggota khusus dan anggota tetap yang bertugas menjadi agen penyusup dalam pelaksanaan penggalangan intelijen. Hal lainnya yang dapat dilakukan adalah melakukan koordinasi secara internal dengan Kapolres Salatiga, agar mutasi anggota tidak diberlakukan terhadap agen terpilih dalam aksi penggalangan intelijen tersebut. Hal ini perlu dilakukan karena, kemampuan anggota dalam aksi penggalangan tersebut dapat menjadi kunci utama yang menentukan

keberhasilan dalam pelaksanaan aksi penggalangan intelijen dalam pencegahan hoax menjelang masa Pilpres 2019 di wilayah hukum Polres Salatiga tersebut.

b. Metode

Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa metode yang diterapkan dalam pelaksanaan penggalangan intelijen dilakukan secara tertutup. Tetapi dalam aksi penggalangan intelijen ini pelaksanaannya tidak terarah. Pernyataan tersebut sesuai dengan hasil wawancara berikut ini:

Penggalangan intelijen pada prinsipnya dilakukan dalam bentuk operasi Intelijen, bersifat tertutup, dilaksanakan berencana dan terarah, namun kendala yang kita temui di lapangan dalam pelaksanaannya penggalangan intelijen ini kurang terarah, sehingga dengan pelaksanaan metode yang demikian, penggalangan intelijen tidak dilakukan secara maksimal, yang mana hal ini akan mampu mempengaruhi keberhasilan dalam mencapai tujuan penggalangan intelijen tersebut. (Hasil wawancara dengan Kanit Intelkam III, Aiptu Agus Saryanto, 21 Februari 2019)

Berdasarkan hasil wawancara selanjutnya juga diketahui bahwa kendala yang muncul dalam pelaksanaan penggalangan intelijen ini juga berasal dari penggunaan strategi dan taktik yang belum mampu mempengaruhi secara psikologis melalui emosi, sikap, tingkah laku, opini dan motivasi sasaran, yang mana hal ini sesuai dengan penjelasan sebagai berikut:

Operasi penggalangan yang mempunyai aspek taktis dan strategis belum mampu mempengaruhi secara psikologis melalui emosi, sikap, tingkah laku, opini dan motivasi

(ESTOM) sasaran perorangan maupun kelompok sasaran kelompok pelaku dan penggerak hoax. (Hasil wawancara dengan Kanit Intelkam III, Aiptu Agus Saryanto, 21 Februari 2019)

Kesalahan lainnya dalam penerapan metode penggalangan intelijen juga terlihat dari prinsip pelaksanaan penggalangan yang dilakukan secara terbuka terhadap sasaran perorangan, yang mana hal ini mampu membuat tujuan penggalangan tidak tercapai. Penjelasan tersebut sesuai dengan hasil wawancara berikut ini:

Penggalangan terhadap sasaran perorangan dilakukan dengan tahap pendekatan, mempengaruhi, mengarahkan dan mengendalikan serta pemanfaatan objek penggalangan yang dilakukan secara terbuka. (Hasil wawancara dengan Kanit Intelkam III, Aiptu Agus Saryanto, 21 Februari 2019)

Berdasarkan hasil wawancara selanjutnya juga diketahui bahwa kelemahan lainnya dalam pelaksanaan penggalangan intelijen dari unsur metode juga dapat ditunjukkan pada kondisi sebagai berikut. Sebenarnya metode yang harus diterapkan dalam penggalangan intelijen terhadap sasaran yang bersifat kelompok dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- a) Penyusupan, Satuan Intelkam belum mampu melakukan penyusupan ke dalam kelompok sasaran. Sehingga informasi yang di dapat melalui sumber ke 2 (dua) dari jaringan yang ada di dalam kelompok.
- b) Penceraiberaian, di tahap ini sering terjadi perbedaan pendapat antara kelompok yang pro dan kontra terkait aksi

hoax di jalanan tersebut, dan hal ini belum mampu diarahkan dan dimanfaatkan oleh agen penyusup atau unit penggalangan.

- c) Agen penyusup dalam tahap pengingkaran, pengarahan, pengusut kesetiaan, penggeseran dan penggabungan yang dilakukan terhadap sasaran yang bersifat kelompok belum mampu melaksanakan tahapan tersebut dengan baik. (Hasil wawancara dengan Kasat Intelkam, Mohammad Bisri SE, 20 Februari 2019)

Kelemahan lainnya dalam pelaksanaan penggalangan intelijen yang dilihat dari unsur metode juga ditunjukkan pada kondisi sebagai berikut :

Penggunaan taktik penggalangan intelijen yang dilakukan melalui pemberian hadiah dan pemanfaatan pemikiran para akademisi/kelompok intelektual masih sangat minim, pada hal metode tersebut sangat tepat sekali untuk dilaksanakan manakala agen penyusup ketika di lapangan mengalami permasalahan yang belum terprediksi sebelumnya. Kendala selanjutnya juga berasal dari pihak Polres Salatiga yang juga belum memiliki unit yang didukung oleh personil yang memiliki kemampuan kejuruan penggalangan secara khusus. (Hasil wawancara dengan Kasat Intelkam, Mohammad Bisri SE, 20 Februari 2019)

Berdasarkan hasil wawancara di atas, diketahui bahwa kelemahan dalam penggalangan intelijen muncul dari faktor metode, yang mana hal ini disebabkan anggota belum mampu melakukan aksi penggalangan intelijen pada sasaran kelompok,

selain itu juga anggota belum mampu melakukan metode dengan benar sesuai dengan mekanisme penggalangan intelijen baik yang didasarkan pada kelompok maupun perorangan, yang mana hal ini selanjutnya berdampak pada keberhasilan pencapaian tujuan dalam penggalangan intelijen tersebut.

Kendala yang muncul dalam pelaksanaan penggalangan intelijen juga berasal dari penggunaan strategi dan taktik yang digunakan oleh anggota, dimana anggota atau agen penggalangan saat ini belum mampu mempengaruhi secara psikologis melalui emosi, sikap, tingkah laku, opini dan motivasi sasaran, baik sasaran individual maupun sasaran kelompok. Hal ini dapat diamati dari adanya kesalahan dalam penerapan metode penggalangan intelijen, seperti pelaksanaan penggalangan yang dilakukan secara terbuka terhadap sasaran perorangan. Kendala lain dalam pelaksanaan metode penggalangan intelijen juga dapat diketahui sebagai berikut:

- 1) Penyusupan, Satuan Intelkam belum mampu melakukan penyusupan ke dalam kelompok sasaran dengan tanpa menimbulkan kecurigaan sama sekali.
- 2) Penceraiberaian, di tahap ini sering terjadi perbedaan pendapat antara kelompok yang pro dan kontra terkait aksi unjuk rasa tersebut, dimana agen penyusup dalam kondisi ini belum mampu mengarahkan dan memanfaatkan hal tersebut.
- 3) Agen penyusup dalam tahap pengingkaran, pengarahan, pengusut kesetiaan, penggeseran dan penggabungan juga belum mampu melaksanakan tahapan tersebut dengan baik.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut yang pertama adalah menerapkan metode tertutup baik penggalangan intelijen

ditujukan kepada sasaran perorangan maupun sasaran kelompok. Selain itu, agen juga dapat melakukan koordinasi secara terus menerus dengan Kasat Intelkam guna memperoleh petunjuk tindakan yang tepat manakala agen menemui kendala di lapangan. Kapolres Salatiga juga dapat mengambil kebijakan untuk memberikan pelatihan secara khusus terhadap agen yang telah terpilih dalam melaksanakan aksi penggalangan intelijen, sehingga agen terpilih mampu menguasai metode yang tepat dalam pelaksanaan penggalangan intelijen.

c. Anggaran

Faktor lain yang mempengaruhi Satuan Intelkam dalam penggalangan intelijen tersebut juga berasal dari anggaran. Berdasarkan dari hasil wawancara yang dilakukan kepada Kasat Intelkam, diketahui sebagai berikut:

Anggaran yang dimiliki Satuan Intelkam masih kurang sehingga hal ini mengakibatkan pelaksanaan penggalangan intelijen kurang optimal. Anggaran yang disediakan dari DIPA kurang lebih Rp 20 juta/kegiatan, yang kami gunakan untuk pembentukan jaringan, yang nantinya berkaitan dengan masing-masing fungsi atau bidang untuk kepentingan pelaksanaan penggalangan. Melihat dana anggaran yang jumlahnya segitu, hal ini dirasakan anggaran tersebut belum mampu mencukupi kebutuhan untuk pasca pelaksanaan penggalangan intelijen seperti terkait pembinaan jaringan. (Hasil wawancara dengan Kasat Intelkam, Mohammad Bisri SE, 20 Februari 2019)

Faktor yang ikut berpengaruh dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan penggalangan intelijen dalam pencegahan hoax menjelang masa Pilpres 2019 di wilayah hukum Polres Salatiga yang dilakukan oleh Satuan Intelkam adalah berasal dari dukungan anggaran. Anggaran memiliki fungsi sebagai alat perencanaan, di mana anggaran tersebut dapat digunakan untuk merumuskan tujuan serta sasaran kebijakan agar sesuai dengan visi dan misi yang ditetapkan, merencanakan berbagai program dan kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi serta merencanakan alternatif sumber pembiayaannya, serta mengalokasikan dana pada berbagai program dan kegiatan yang telah disusun, serta dapat digunakan sebagai penentu indikator kinerja dan tingkat pencapaian strategi.

Fungsi anggaran yang digunakan dalam kegiatan penggalangan intelijen dalam pencegahan hoax menjelang masa Pilpres 2019 di wilayah hukum Polres Salatiga yang dilakukan oleh Satuan Intelkam Polres Salatiga adalah sebagai alat untuk melakukan pelaksanaan kegiatan penggalangan intelijen ini.

Anggaran selain sebagai alat perencanaan juga memiliki fungsi sebagai alat pengendalian. Sebagai alat pengendalian, anggaran memberikan rencana detail atas pengeluaran yang akan dilakukan dan dipertanggungjawabkan kepada organisasi. Anggaran sebagai instrumen pengendalian dapat digunakan untuk menghindari adanya pengeluaran uang terlalu banyak, agar tidak menghabiskan waktu dari jangka waktu yang telah ditentukan dan menghindari adanya peluang salah sasaran dalam pengalokasian anggaran pada bidang lain yang bukan merupakan prioritas pelaksanaan penggalangan intelijen ini.

Anggaran ini juga memiliki fungsi sebagai alat koordinasi dan komunikasi antar bagian masyarakat di dalam pelaksanaan kegiatan kemasyarakatan yang mana dalam hal ini agen penyusup melakukan aksi penggalangan intelijen tersebut yang selanjutnya ditujukan untuk pencegahan hoax menjelang masa Pilpres 2019 di wilayah hukum Polres Salatiga yang dilakukan oleh Satuan Intelkam.

Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa pelaksanaan kegiatan penggalangan intelijen dalam pencegahan hoax menjelang masa Pilpres 2019 di wilayah hukum Polres Salatiga yang dilakukan oleh Satuan Intelkam Polres Salatiga sudah memperoleh anggaran yang khusus tertuang di dalam DIPA. Dengan adanya prioritas khusus dalam DIPA ini dapat menunjukkan bahwa pelaksanaan penggalangan intelijen dalam pencegahan hoax menjelang masa Pilpres 2019 di wilayah hukum Polres Salatiga ini memiliki prioritas yang tinggi di wilayah ini, yang selama ini telah menjadi permasalahan umum di wilayah hukum Polres Salatiga.

Menanggapi hal tersebut, maka yang perlu dilakukan adalah lebih memprioritaskan dan memaksimalkan tujuan dari kegiatan penggalangan intelijen dalam pencegahan hoax menjelang masa Pilpres 2019 di wilayah hukum Polres Salatiga. Kegiatan ini dapat dilakukan dengan cara memanfaatkan anggaran yang ada tersebut, sehingga operasional kegiatan penggalangan intelijen dapat dilaksanakan dengan maksimal, akan tetapi perlu adanya penambahan jumlah anggaran yang akan digunakan untuk kegiatan penggalangan intelijen selama 1 (satu) tahun meskipun mulai tahun 2016 anggaran yang dikhususkan untuk kegiatan penggalangan intelijen tersebut sudah mulai dianggarkan.

d. Sarana dan Prasarana

Berdasarkan hasil wawancara selanjutnya diketahui bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi Satuan Intelkam dalam penggalangan intelijen juga berasal dari sarana dan prasarana. Hal ini sesuai dengan penjelasan sebagai berikut:

Untuk kepentingan pelaksanaan penggalangan intelijen, kami juga terkedala dari aspek sarana dan prasarana, khususnya alat-alat khusus seperti perekam/handycam, kamera dan alat penyadap lainnya yang up to date. (Hasil wawancara dengan Kasat Intelkam, Mohammad Bisri SE, 20 Februari 2019)

Sarana merupakan salah satu faktor internal yang dipergunakan dalam pelaksanaan penggalangan intelijen. Ketersediaan sarana dan prasarana yang digunakan dalam pelaksanaan penggalangan intelijen ini memiliki fungsi sebagai media guna mempermudah kinerja maupun alat komunikasi dalam pelaksanaan penggalangan intelijen.

Berkaitan dengan pentingnya sarana sebagai alat penunjang kegiatan penggalangan intelijen ini, sarana prasarana tersebut berasal dari tidak adanya alat-alat khusus yang up to date seperti alat perekam/handycam, kamera dan alat penyadap suara. Dengan adanya kendala tersebut maka dalam pelaksanaan penggalangan intelijen tidak dapat dilaksanakan secara maksimal.

Untuk mengatasi permasalahan keterbatasan sarana dan prasarana yang digunakan dalam pelaksanaan penggalangan intelijen di atas, upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut dapat dilakukan pengajuan rencana

penambahan anggaran untuk pengadaan sarana dan prasarana kepada Kasat Intelkam dan selanjutnya Kasat Intelkam dapat memintakan kebutuhan tersebut kepada Kapolres Salatiga, agar kendala sarana dan prasarana di tahun-tahun kedepannya nanti bisa diatasi dan keberadaan sarana prasarana ini dapat menunjang kegiatan pelaksanaan penggalangan intelijen yang dilakukan untuk pencegahan hoax menjelang masa Pilpres 2019 di wilayah hukum Polres Salatiga, yang dilakukan oleh Satuan Intelkam Polres Salatiga.

2. Faktor Eksternal

Berdasarkan hasil wawancara selanjutnya diketahui bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi Satuan Intelkam dalam pelaksanaan penggalangan intelijen juga berasal dari sasaran penggalangan itu sendiri, yang mana hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

Faktor-faktor yang mempengaruhi Satuan Intelkam dalam pelaksanaan penggalangan intelijen berasal dari pekanya sasaran baik sasaran kelompok maupun sasaran perorangan terhadap agen penyusup. Kami mengalami kesulitan apabila sasaran ini sangat peka terhadap pergerakan dari agen yang kami terjunkan. Hal ini terjadi karena mereka selalu waspada terhadap orang yang belum dikenal, sehingga kalau ada orang baru yang masuk ke lingkungan mereka, pasti mereka merasa curiga, sehingga hal ini akan mempersulit agen kita untuk bergerak. (Hasil wawancara dengan Kasat Intelkam, Mohammad Bisri SE, 20 Februari 2019)

Berdasarkan hasil wawancara selanjutnya juga diketahui bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi Satuan Intelkam dalam

penggalangan intelijen juga berasal dari kurangnya kerjasama antara fungsi Intelkam, maupun fungsi Intelkam dengan fungsi lainnya, yang mana hal ini juga sesuai dengan penjelasan sebagai berikut :

Kendala dalam penggalangan intelijen juga berasal dari kurangnya kerjasama antara fungsi Intelkam, maupun fungsi Intelkam dengan fungsi lainnya, yang mana hal ini berakibat pada pelaksanaan penggalangan intelijen yang dilakukan oleh agen penyusup kurang maksimal. Hal ini dikarenakan tidak semua agen memiliki kemampuan penggalangan yang sama. (Hasil wawancara dengan Kasat Intelkam, Mohammad Bisri SE, 20 Februari 2019)

Faktor lain yang ikut mempengaruhi Satuan Intelkam dalam pelaksanaan penggalangan intelijen juga berasal dari sasaran penggalangan itu sendiri, yang mana hal ini dapat dijelaskan adanya kepekaan sasaran terhadap pergerakan agen penggalangan ini. Kepekaan sasaran terhadap pergerakan agen penggalangan ini dapat disebabkan oleh adanya kemampuan agen yang masih minim khususnya terkait keterampilan, sikap dan pengetahuannya dalam pelaksanaan penggalangan intelijen, seperti anggota yang belum menguasai teknik penggalangan, khususnya dalam prosedur perang Urat Saraf (PUS) atau Operasi Penggalangan Psikologis, pelaksanaan propaganda melalui penyebaran pernyataan atau gagasan-gagasan, pelaksanaan kampanye berbisik untuk melawan isu negatif, pelaksanaan penyebaran rumor ke dalam lingkungan kelompok masyarakat tertentu untuk menimbulkan keraguan terhadap loyalitas kelompok, penggunaan isu, pelaksanaan penggunaan gosip untuk menciptakan pengingkaran kelompok terhadap integritas pimpinan kelompok, pelaksanaan kegiatan mempengaruhi pikiran oknum atau kelompok yang menentang penegak hukum,

pemanfaatan kelemahan atau kerawanan ekonomi untuk mempengaruhi sasaran dan lain sebagainya. Dimana dengan adanya ketidakmampuan ini mampu menimbulkan kecurigaan sasaran terhadap agen, hingga terjadinya kebocoran informasi intelijen.

Untuk mengatasi permasalahan ini yang dapat dilakukan hanyalah dalam penyiapan agen penyusup, perlu diberikan pelatihan yang khusus, agar agen memiliki keterampilan, pengetahuan dan sikap yang tepat dalam pelaksanaan penggalangan intelijen, sehingga semua tahapan dalam pelaksanaan penggalangan intelijen dapat dilakukan dengan benar dan aksi penggalangan intelijen yang dilakukan oleh agen penyusup Satuan Intelkam Polres Salatiga mampu memberikan hasil yang maksimal, yaitu mampu menertibkan organisasi kemasyarakatan (ormas) di wilayah hukum Polres Salatiga.

X. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil temuan penelitian dan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa:

1. Fungsi penggalangan intelijen dalam pencegahan penyebaran hoax menjelang masa pemilihan presiden di wilayah hukum Polres Salatiga dijadikan sebuah rencana strategi yang sesuai dengan visi misi Polres Salatiga agar tetap maksimalnya dalam pelaksanaan tugas pokok sebagai pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat serta penegak hukum yang tegas, profesional, modern, bermoral, transparan, akuntabel dan bermasyarakat untuk menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat serta sinergitas polisional antar instansi guna mendukung terselenggarakan pembangunan di wilayah Polres

Salatiga berorientasi pada jangkauan masa depan untuk mencegah dampak penyebaran hoax yang kedahsyatannya mampu merusak bukan hanya satu generasi tetapi mampu merusak banyak generasi bahkan berabad-abad lamanya.

2. Mekanisme penggalangan intelijen dalam pencegahan penyebaran hoax menjelang masa pemilihan presiden di wilayah hukum Polres Salatiga diterapkan dengan langkah-langkah perencanaan, pelaksanaan yang meliputi tahap-tahap penyusupan, penceriberaian, pengingkaran, pengarahannya, pengusutan kesetiaan, penggeseran, dan penggabungan, serta melakukan evaluasi dan pelaporan aksi penggalangan intelijen kepada pimpinan.
3. Faktor-faktor yang mempengaruhi penggalangan intelijen dalam pencegahan penyebaran hoax menjelang masa pemilihan presiden di wilayah hukum Polres Salatiga berasal dari adanya kendala SDM yang menjadi permasalahan dalam melakukan penggalangan, seperti kurangnya fasilitas yang tersedia sehingga kurang sempurna nya penggalangan dilaksanakan, terbatasnya anggaran untuk operasi penggalangan intelijen, dan belum dilakukannya metode yang tepat dalam pelaksanaan aksi penggalangan intelijen, serta pekannya sasaran terhadap aksi agen penyusup yang melakukan aksi penggalangan intelijen tersebut.

Saran yang dapat diberikan peneliti terkait dengan hasil penelitian pelaksanaan aksi penggalangan intelijen dalam pencegahan penyebaran hoax menjelang masa pemilihan presiden di wilayah hukum Polres Salatiga adalah sebagai berikut:

1. Membekali agen penyusup dengan berbagai standar pelatihan aksi yang memiliki standar kepelatihan penggalangan intelijen,

dan membekali agen penyusup berbagai kemampuan untuk melakukan pendekatan kepada masyarakat serta kemampuan untuk pemanfaatan teknologi yang dapat digunakan untuk aksi penggalangan intelijen

2. Agar personil Polres Salatiga membuat aplikasi website yang dapat dilihat oleh masyarakat tentang benar apa tidaknya berita hoax tersebut, aplikasi tersebut yang terupdate dalam seminggu kedepan yang dapat dipercayai, sehingga dengan membuka aplikasi tersebut masyarakat dapat mengetahui berita tersebut hoax apa tidak.
3. Agar para personil polres Salatiga tidak sering di mutasikan atau di ganti fungsi teknisnya, karena bisa menghambat kemampuan para personil itu sendiri, karena banyak ditemukannya personil yang baru di fungsi teknis yang baru.
4. Agar sarana prasarana untuk melakukan penggalangan intelijen harus dilengkapi sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan oleh para anggota itu sendiri dan memberikan apresiasi kepada para personil Polres Salatiga yang telah berhasil melaksanakan tugas dengan semaksimal mungkin.

UCAPAN TERIMA KASIH

Tidak Ada.

KONFLIK KEPENTINGAN

Penulis menyatakan bahwa tidak terdapat konflik kepentingan dalam riset dan publikasi ini.

REFERENSI

- Aisyah, Siti, et al. "Hoax News and Future Threats: A Study of the Constitution, Pancasila, and the Law." *Indonesian Journal of Pancasila and Global Constitutionalism* 1, No. 1 (2022): 171-238.
- Anto, Abdul Haris Fitri. "Critical Netizenship Attitude: Program Pengembangan Sikap Kritis terhadap Kampanye di Media Sosial pada Pemilu Pemula Menjelang Tahun Politik 2018-2019." *Jurnal Abdimas* 23, No. 1 (2019): 55-63.
- David, Fred R. *Manajemen Strategi Konsep-Konsep*. (Jakarta: PT Indeks Kelompok Gramedia, 2004).
- Hanafi, Fahrudin, et al. "Bijak Bermedia Sosial pada Remaja." *Jurnal Bina Desa* 3, No. 2 (2021): 61-67.
- Indrawan, Rully dan Poppy Yuniawati. *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Campuran untuk Manajemen, Pembangunan, dan Pendidikan*. (Bandung: PT Refika Aditama, 2017).
- Jauch, Lawrence R. dan William F. Gluech. *Manajemen Strategis dan Kebijakan*. (Perusahaan. Jakarta: Erlangga, 1998).
- Juliswara, Vibriza. "Mengembangkan model literasi media yang berkebhinnekaan dalam menganalisis informasi berita palsu (hoax) di media sosial." *Jurnal Pemikiran Sosiologi* 4, No. 2 (2017).
- Lutfiyah, Khoirum. "Hoax and Fake News During Covid-19: Is the Law Effective in Overcoming It?." *The Indonesian Journal of International Clinical Legal Education* 2, No. 3 (2020): 345-360.
- Perkabik No. 3 Tahun 2013 Tentang Penggalangan Intelijen.
- Perkapolri No. 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor.
- Robbins, Stephen P. dan Coulter, Mary. *Manajemen Edisi Kesepuluh*. (Jakarta: Erlangga, 2010).
- Siswoko, Kurniawan Hari. "Kebijakan Pemerintah Menangkal Penyebaran Berita Palsu atau 'Hoax'" 1, No. 1 (April 2017): 13-19.
- Terry, GR. *Prinsip-Prinsip Manajemen Cetakan 10*. (Jakarta: PT. Bumi, 2009).

Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Yunus, Nur Rohim, and Annissa Rezki. "Government Preparation for Hoax Cases During the Covid-19 Pandemic to Preserve the Nation's Unity and Cohesion." *Jurnal Scientia Indonesia* 8, No. 1 (2022): 115-130.

The biggest hoax is not spreading fake news but hiding the truth from the public.

Prof. Dr. Daniel Mohammad Rosyid